



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI DENGAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
DAN KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 23 Juni 2020
Waktu	: 10.30 s.d. 15.30 WIB
Tempat	: Kantor/Rumah masing-masing (rapat secara virtual)
Ketua Rapat Acara	: Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019; 2. RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021; 3. Hasil Pemeriksaan BPN Semester II TA.2019; dan 4. Isu-isu Aktual.
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI)
Hadir	: A. Anggota DPR RI: 48 orang dari 55 Anggota Komisi IV dengan rincian: 1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) 10 dari 12 orang Anggota 1. Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI) 2. H. Sunarna, S.E., M.Hum. 3. Ir. Effendi Sianipar 4. Ono Surono, S.T., 5. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si. 6. Vita Ervina, S.E., M.B.A. 7. H. Yadi Srimulyadi 8. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si. 9. Maria Lestari, S.Pd. 10. Riezky Aprilia, SH., MH.

- 2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)**
7 dari 8 orang Anggota
 1. H. Dedi Mulyadi, S.H. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
 2. H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
 3. Budhy Setiawan
 4. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
 5. Ir. Ichsan Firdaus
 6. A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H.
 7. Alien Mus, S.H.
- 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)**
6 dari 7 orang Anggota
 1. G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
 2. Ir. KRT. H. Dadori Wonodipuro, M.M.
 3. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
 4. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, Dess., M.Sc.
 5. Ir. H. T.A. Khalid, M.M.
 6. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.
- 4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)**
4 dari 6 orang Anggota
 1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
 2. H. Sulaeman L. Hamzah
 3. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
 4. H. Charles Meikyansah
 5. Julie Sutrisno
- 5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)**
6 dari 6 orang Anggota
 1. Daniel Johan (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
 2. H. Muhtarom, S.Sos.
 3. Drs. H. Ibnu Multazam
 4. Farida Hidayati, S.H., M.Kn.
 5. Luluk Nur Hamidah, M.Si, M.P.A.
 6. Edward Tannur, S.H.
- 6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)**
4 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. Suhardi Duka, M.M.
 2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
 3. Muslim, S.HI., M.M.
 4. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.
- 7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)**
5 dari 5 orang Anggota

1. drh. H. Slamet
2. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
3. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
4. H. Johan Rosihan, S.T.
5. Drs. Hamid Noor Yasin., M.M.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)

4 dari 4 orang Anggota

1. Haerudin, S.Ag., M.H.
2. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
3. Fachry Pahlevi Kanggoasa, S.E.
4. Slamet Ariyadi, S.Psi.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

2 dari 2 orang Anggota

1. K. H. Asep A.Maosul S.Sy.
2. Ema Umiyyatul Chusnah

A. Sekretariat Jenderal

B. Pemerintah:

1. Dr. Edhy Prabowo, M.M., M.B.A. (Menteri Kelautan dan Perikanan);
2. Dr. Muhammad Yusuf, S.H., M.M. (Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
3. M. Zulficar Mochtar, S.T., M.Sc. (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan);
4. Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan);
5. Dr. Ir. Aryo Hanggono, DEA. (Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan);
6. Ir. R. Nilanto Perbowo, M.Sc. (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
7. Dr. TB. Haeru Rahayu (Direktur Jenderal Pengawasan 2 Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
8. Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA. (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
9. Dr. Ir. Rina, M.Si. (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan).

10. Farida Mokodompit, Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Persero);
11. M. Yana Aditya, Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Persero); dan
12. Arief Haendra, Direktur Pengembangan PT Garam (Persero).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang terhormat Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia beserta jajarannya,
Yang terhormat Direktur Utama Perum Perikanan Nusantara,
Yang terhormat Direktur Utama PT Perikanan Nusantara, dan serta
Yang terhormat Direktur Utama PT Garam. PT Garam dalam hal ini Bapak/Ibu sudah membuat surat ijin dan sudah disampaikan ke saya, dan yang bersangkutan juga tadi pagi sudah WA saya. Beliau saat ini masih agak kurang sehat.

Hadirin yang kami hormati,

Mengawali rapat hari ini, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja ini dalam keadaan sehat wal'afiat walaupun saat ini virus Covid-19 belum berlalu. sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus tanggal 30 April dan keputusan Rapat Internal Komisi IV tanggal 17 Juni 2020 pada hari ini Selasa, 23 Juni 2020 Komisi IV menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019, hasil pemeriksaan BPK Semester II Tahun Anggaran 2019, Rencana Kerja dan Anggaran serta Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2021 serta isu-isu lainnya.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib, rapat hari ini kami nyatakan terbuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)

Rapat Kerja hari ini dimulai pukul 10.30, dan akan diakhiri pada pukul 15.30 tapi kata Pimpinan sebelah saya tadi kalau bisa sampai jam 18.30. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat,
2. Penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap agenda rapat,
3. Tanggapan Komisi IV,
4. Jawaban Menteri Kelautan dan Perikanan,
5. Kesimpulan Rapat,
6. Penutup.

Apakah acara dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Sebagaimana kita ketahui, tata cara pelaksanaan tugas Komisi dalam bidang anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau Lembaga (RKA-KL) dalam ruang lingkup tugas Komisi dan usulan. Saya tegaskan kembali, dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah. Selanjutnya hasil pembahasan ini akan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi.

Perlu kami sampaikan disini bahwa pelaksanaan Rapat Kerja hari ini adalah sesuai dengan surat Badan Anggaran Nomor 098/PD.02/6/2020, tanggal 8 Juni 2020 mengenai Penyampaian Rancangan Jadwal Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, sebagai acuan dalam Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2021 dan RKP Tahun 2021 antara Komisi-Komisi dengan mitra kerjanya.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Komisi IV mengapresiasi atas capaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 dengan realiasi penyerapan anggaran sebesar 91,73% atau Rp5,05 Triliun dari pagu sebesar Rp5,51 Triliun. Selain itu Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga mengapresiasi atas tidak adanya temuan dalam ikhtisar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester II Tahun 2019 di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Capaian tersebut perlu dipertahankan pada kinerja Tahun 2020.

Selanjutnya terkait dengan penyusunan dokumen kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun 2021 ditengah kondisi yang extra ordinary pandemi Corona 2019 mau tidak mau mengharuskan adanya penyesuaian kebijakan dampak dari perubahan perkembangan dan tatanan ekonomi, sosial diseluruh dunia sehingga membuat program dan kegiatan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 tidak optimal karena adanya pemotongan anggaran untuk penanganan COVID-19.

Namun dari data Komisi IV DPR RI, mulai Tahun 2012 hingga 2020 anggaran belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan sangatlah jauh atau rendah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jika di presentasi tidak lebih dari 0,80%. Itu pun anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tertinggi di Tahun 2017 sebesar Rp9,138 Triliun. Sehubungan dengan hal tersebut di Tahun 2021 pagu indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp5,67 Triliun. Komisi IV DPR RI masih menilai perlu adanya dukungan penambahan anggaran dengan menitikberatkan pada program dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi pelaku utama sector kelautan dan perikanan. Jadi teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI yang di Banggar Tahun 2021 Cuma anggarannya Rp5,67 Triliun. ini masih sangat minim sekali. Saya minta nanti bantuannya teman-teman yang di Banggar untuk berusaha menaikkan pagu anggaran minimal harus diatas Rp7 Triliun. Dan mampu meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan. Hal ini seiring dengan komitmen Pemerintah dalam upaya pencapaian visi 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada Tahun 2045 yaitu menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

Selanjutnya Komisi IV juga meminta penjelasan mengenai isu-isu penting terkini, antara lain: sejauhmana kebijakan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan saat ini dalam rangka menghadirkan program dan kegiatan prioritas unggulan, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, optimal dan inklusif. Berdasarkan kesimpulan Raker 25 Februari yang lalu bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta untuk menyelesaikan merevisi segala Peraturan Menteri atau petunjuk teknis/petunjuk pelaksana yang masih berpolemik. Yang mana saat ini masih ada polemik mengenai alat penangkap cantrang dan ekspor benih lobster.

Kemarin saya telepon Pak Dirjen Budidaya karena belum terbitnya PMK. Jadi Pak Edhy ini semangatnya luar biasa. PMK-nya belum tetap dilanjutkan tapi dengan catatan ada deposito sebagai penjamin untuk PNB dan pajak. Tapi saran saya, sebaiknya selesaikan dulu PMK-nya supaya jangan ada tumpang tindih, jangan ada seolah-olah kerjanya terlalu dipaksakan sekali.

Hadirin yang saya hormati,

Demikian pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut diatas.

Silakan Pak Menteri.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (Dr. EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu,
Namo Budhaya,
Salam Kebajikan.*

Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan Bapak/Ibu Anggota Komisi IV DPR RI, para Pejabat Eselon I beserta seluruh jajaran Kementerian Kelautan Perikanan, hadirin sekalian yang saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam. Dalam kesempatan ini perkenankanlah kami mengucapkan "Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah, Mohon Maaf Lahir dan Bathin". Semoga Allah Subhanahu Wata'ala meridhoi dan menerima amal ibadah kita semua. Aamiin Ya Robbal'amin.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang terhormat.

Sesuai dengan agenda Rapat Kerja hari ini perkenankanlah kami menyampaikan penjelasan mengenai:

1. Evaluasi pelaksanaan APBN KKP Tahun Anggaran 2019.
2. Tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan BPK Semester II Tahun Anggaran 2019.
3. Rencana Kerja dan Anggaran KKP Tahun Anggaran 2021, dan
4. Isu-isu aktual dan perikanan.

Mengenai evaluasi pelaksanaan APBN KKP Tahun Anggaran 2019.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV yang DPR RI yang kami hormati.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi IV DPR RI dalam pelaksanaan program kerja KKP Tahun Anggaran 2019 yang capaiannya dapat kami laporkan sebagai berikut:

Yang pertama, realisasi rata-rata anggaran KKP Tahun Anggaran 2019 mencapai 91,73% dari total pagu anggaran sebesar Rp5,51 Triliun dengan rincian realiasi belanja pegawai sebesar 97,46%, realisasi belanja barang sebesar 88,48%, realisasi belanja modal sebesar 91,10%.

Highlight capaian program KKP Tahun Anggaran 2019. Yang pertama, program pengelolaan perikanan tangkap meliputi bantuan 2018 unit alat penangkap ikan, 294 unit bantuan kapal ikan, 50 unit mesin kapal, 150.000

asuransi nelayan, perijinan SILAT menerbitkan 3690 SIUP, 4546 SIPI, 324 SIKPI, SIMKADA menerbitkan 3086 SIUP, 10.128 SIPI dan SIKPI.

Program pengelolaan perikanan budidaya meliputi 230.930 juta ekor bantuan benih, 1,11 juta ekor calon induk, 264 paket bioflog, 10 kawasan pengelolaan irigasi tambak partisipatif, 400 paket mina padi, dan 55 paket pakan ikan mandiri.

Program pengelolaan ruang laut. Pengelolaan ruang laut mengikuti peliputan bantuan PUGAR 22 Kabupaten, 6 GT atau dermaga apung, bantuan untuk 28 kelompok masyarakat konservasi, 6 pusat restorasi dan pengembangan eco wisata pesisir, *hybrid engineering* sepanjang 1.975 meter di 3 lokasi, 24 RZWP3K telah menjadi Perda.

Program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan meliputi 300 *chess fisher*, 70 *ice block machine* 1,5 ton, kemudian 10 *ice block machine* 5 ton, 28 unit kendaraan berpendingin, 1 unit *cold storage*, 1 sentra kuliner, 1 pasar ikan bersih, dan 1 pasar ikan modern.

Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan meliputi 85 hari operasi kapal pengawas, 65 hari operasi pesawat pengawas, 30 hari operasi speedboat, dan sebanyak 48 kapal ikan Indonesia, dan 59 kapal ikan asing yang melakukan illegal fishing berhasil ditangkap.

Program riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan meliputi 22.650 pelatihan masyarakat, 3500 kosertifikasi kompetensi, 40.000 kelompok yang disuluh, 1903 kelompok yang meningkat kelasnya, 1808 lulusan yang terserap di dunia usaha dan industri, riset 3 WPP dan 1 KPPUD, 9 program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan meliputi, 1049 unit UPI yang memenuhi persyaratan ekspor, 31 lokasi wilayah perbatasan yang terlayani dan teratasi, 500 unit usaha pembudidayaan ikan. Menerapkan cara karantina ikan yang baik. 1963 nomor registrasi unit pengelolaan ikan ke negara tujuan ekspor.

Bapak/Ibu, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester II Tahun Anggaran 2019 untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK semester II Tahun Anggaran 2019 di KPP syukur Alhamdulillah berkat kerja keras seluruh jajaran KKP dan dukungan Bapak/Ibu dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI tidak ada temuan pemeriksaan di lingkup KKP yang dimuat dalam IHPS BPK semester II Tahun 2019. Selanjutnya KKP akan terus memperbaiki kualitas laporan keuangan dengan melakukan penyempurnaan beberapa hal yang memerlukan tindak lanjut dan penguatan.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Rencana Kerja dan Anggaran KKP Tahun Anggaran 2021 untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan pada Tahun Anggaran

2021 Pemerintah menyiapkan restrukturisasi program dan penganggaran. Tujuan restrukturisasi diantaranya untuk memastikan fungsi seluruh elemen Pemerintah tercermin dan terbagi habis diseluruh program Kementerian dan Lembaga, serta memastikan pelaksanaan seluruh prioritas nasional dan meja project terakomodasi dalam program kegiatan output Kementerian/Lembaga, dan memastikan konvergensi pencapaian sasaran dalam program lintas, baik program lintas unit Eselon I dalam 1 Kementerian dan Lembaga maupun program lintas Kementerian dan Lembaga. Saat ini ada 86 Kementerian dan Lembaga dengan 289 Eselon I yang memiliki 424 program dan pada Tahun Anggaran 2021 program-program tersebut direstrukturisasi menjadi 102 program yang terdiri dari 84 program spesifik Kementerian/Lembaga, 14 lintas Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN, Kepala Bapenas Nomor; S375/MK.02/2020 dan Nomor: B.308/M.PPN/D.8/PP.0403/05/2020, tanggal 8 Mei 2020 tentang daftar program Kementerian atau Lembaga Tahun Anggaran 2021 pada Tahun Anggaran 2021 Kementerian di Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat 6 program, terdiri dari 5 program lintas Kementerian dan Lembaga meliputi: program dukungan manajemen, program kualitas lingkungan hidup, program pendidikan dan pelatihan vokasi, program nilai tambah dan daya saing industri, program riset dan inovasi, IPTEK, serta 1 program spesifik Kementerian/Lembaga yaitu program pengelolaan perikanan dan kelautan.

Pagu indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggarana 2021 berdasarkan restrukturisasi program sebesar Rp5,68 Triliun, terdiri dari: program dukungan manajemen sebesar Rp3,09 Triliun, program pengelolaan perikanan dan kelautan sebesar Rp1,63 Triliun, program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp82 Miliar, program riset dan inovasi IPTEK sebesar Rp112,08 Miliar, program pendidikan dan pelatihan fokasi sebesar Rp618,37 Miliar, program nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp138,08 Miliar.

Selanjutnya pagu indikatif KKP Tahun Anggaran 2021 berdasarkan unit kerja Eselon I diusulkan sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp494,72 Miliar.
2. inspektorat Jenderal sebesar Rp87,77 Miliar.
3. Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp607,25 Miliar.
4. Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp893,04 Miliar.
5. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp819,80 Miliar.
6. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp271,70 Miliar.
7. Ditjen Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp352,59 Miliar.
8. Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1,58 Triliun.
9. Badan Karantina Ikan Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp571,76 Miliar.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Rancangan kegiatan prioritas 2021 adalah sebagai berikut. Ditjen Perikanan Tangkap antara lain untuk bantuan kapal alat penangkap ikan,

asuransi nelayan, fasilitasi, sertifikat hak atas tanah nelayan, pembangunan pelabuhan perikanan, kampung nelayan maju, layanan perijinan, serta operasional SKPT di 4 lokasi.

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya antara lain untuk bantuan benih, kebun bibit rumput laut, eksafator, bioflog, mina padi, pakan mandiri, asuransi budidaya, rehab suprice pembenihan rakyat, skala rumah tangga, meja project kawasan tambak udang dan bandeng, dan operasional SKPT di 3 lokasi.

Tiga, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut antara lain untuk pembangunan demaga apung, pusat restorasi, dan pembangunan ekosistem pesisir, surplus wilayah bahari, integrasi pergaraman, perbaikan gudang garam rakyat, penanam mangrove dan fegetasi pantai, pengelolaan kawasan konservasi perairan, bantuan kelompok penggerak konservasi dan operasional SKPT di 4 lokasi.

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan antara lain untuk *cold storage*, *ice block machine*, *chest freezer*, dan peralatan pengelolaan perlengkapan pedagang ikan, mobil berpendingin, pasar ikan dan sentra kuliner, gemar ikan, promosi produk *fishibility study* pasar ikan modern bertaraf internasional, serta operasional SKPT di 2 lokasi.

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan antara lain untuk operasional kapal pengawas, pesawat patroli, speed boat, ruber boat, pengawas *distract refishing*, pembangunan kapal pengawas, bangunan pengawas, serta pembinaan kepada 1050 Pokmaswas.

Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan antara lain untuk pendidikan fokasi, pelatihan masyarakat, penyuluhan, sertifikasi kompetensi, operasional tenaga penyuluh perikanan, pelatihan dan beasiswa aparatur. Kajian stok sumber daya ikan dan pelayanan umum daratan, kajian rekomendasi IPTEK, dan sarana prasarana Riset.

Tujuh, Badan Karantina Ikan Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, antara lain untuk penanganan kasus pelanggaran perkara binaan dan keamanan hayati ikan, operasional pengawasan ekspor-impor dan domestic, operasional pengawasan mutu serta sarana prasarana pelayanan.

Inspektorat Jenderal diperuntukan antara lain untuk pengawasan internal mitra inspektorat 1 sampai 5. Sekretariat Jenderal diperuntukan antara lain untuk menyiapkan produk hokum dan penataan organisasi, pengelolaan SDM aparatur, perencanaan pengelola administrasi dan pengadaan barang jasa, pengelolaan hubungan masyarakat dan kerjasama luar negeri, pengelolaan data statistik dan informasi, operasional BLU BLUM UKP dan dana dekonsentrasi.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Sektor kelautan dan perikanan akan menjadi pendorong dalam ketahanan pangan nasional melalui pencapaian target produksi perikanan

yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan, termasuk untuk mendukung penurunan angka *stunting* dan meningkatkan imun tubuh. Dampak pasca pandemi COVID-19 disektor kelautan dan perikanan perlu mendapatkan penguatan berupa intervensi program dan anggaran Pemerintah. Terutama pada masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah pemasar, petambak garam sehingga produktivitasnya dapat terus berkelanjutan dan masyarakat mendapatkan kemudahan aksesibilitas terhadap produk perikanan dan kelautan.

Untuk itu KKP mengusulkan tambahan anggaran 2021 sebesar Rp3,45 Triliun yang diharapkan menjadi bahan masukan Pemerintah dalam menyusun dan pagu anggaran Tahun 2021.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV yang kami hormati.

Isu-isu aktual yang dapat kami sampaikan terkait progress tindak lanjut instruksi Menteri Nomor B717/MENKP/XI/2019 tentang kajian terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan yaitu, yang pertama, 3 PERMEN-KP telah ditetapkan yaitu tentang disiplin pegawai ASN KKP dalam pelaksanaan kebijakan moratorium perijinan usaha perikanan tangkap: a. transshipment dilaut dan penggunaan nahkoda dan anak buah kapal asing, b. tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah Negara Republik Indonesia, c. tentang kapal pengangkut ikan hidup.

Yang kedua, 6 Rancangan PERMEN telah selesai harmonisasi dan saat ini dalam proses persetujuan Presiden.

Yang ketiga, 4 Rancangan PERMEN dalam proses harmonisasi,

Yang keempat, 2 Rancangan PERMEN dalam satu Rancangan Kepment masih dalam pembahasan internal KKP.

Tadi ada masukan dari Pak Ketua tentang lobster. Sebenarnya semangat dari pengadaan lobster itu adalah yang sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita maunya ikutin dengan aturan saja semuanya. Tapi intinya sekarang yang paling penting dengan hidupnya. Kita hidupkan kembali lobster ini masyarakat ditingkat bawah dalam hal ini nelayan-nelayan yang selama ini hidupnya tergantung oleh lobster ini bisa memperoleh penghasilan dulu. Dan ini bisa dirasakan Pak Ketua, begitu antusias mereka. Memang kalau kita mengacu dari aturan masalah PNBPN ini sedang dalam penyelesaian. Saya juga baru tahu ternyata cukup sulit juga untuk melakukan ini tapi sudah ada jalan keluarnya Pak Ketua. Tidak ada pelanggaran atau pun tumpang tindih. Karena semuanya yang menangani tetap di Dirjen Bea Cukai, dan komunikasi ini sudah dilakukan secara terus menerus. Jadi intinya Pak Ketua, saya tidak ngotot juga tapi intinya, yang kita ingin selamatkan adalah yang selama ini orang yang hidupnya tergantung ini bisa makan dulu Pak Ketua, dan itu adalah si pelaku nelayan yang menangkap lobster ini.

Nah kita berharap tentunya semua harus sesuai dan tidak ada pilih-pilih atau kita mau menunjuk siapa perusahaan kita berikan keleluasaan

masuk sejauh itu memenuhi kriteria untuk pertama adalah budidayanya, kedua penangkapannya melibatkan seluruh nelayan-nelayan disekitar yang selama ini hidup disitu Pak Ketua. Itu salah satu.

Yang kedua Pak Ketua, kami juga ingin melaporkan bahwa dari sejak pandemi COVID kita juga khawatir terhadap harga-harga ikan, terutama hasil tambak. Alhamdulillah setelah ini harga tambak masih sudah kembali, harga udang sekarang sudah kembali bahkan lebih tinggi daripada sebelum COVID. Untuk ukuran yang 100 ekor per kilo rata-rata harganya sudah diatas mendekati 60.000 Pak Ketua, 58.000 sampai 60.000 dan ini tergantung.

KETUA RAPAT:

Ini bicara paname.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Ya.

Itu Pak Ketua. Jadi Alhamdulillah permintaan ekspor udang terus meningkat. Nah hanya saja Pak Ketua, kemampuan kita dalam produksi ini masih kurang. Nah ini yang sekarang kita terus tingkatkan, terus kita kuatkan, kita berharap kedepan kita akan menjadi pemain utama di dunia. Saat ini untuk Pak Ketua ketahui kemampuan ekspor kita udang, produksi nasional kita belum ada 1 juta, baru 860 ribuan ton.

Nah kita kebutuhan udang didunia sampai 13 juta sampai 15 juta ton. Nah kalau ini kita biarkan kita hanya menjadi penonton Pak Ketua, sementara potensi kelautan Indonesia, potensi tambak udang kita sangat besar. Memang ada kekhawatiran setiap pelaku usaha atau siapa saja yang mau turun ke tambak. Tambak ini dulu memang selalu terkenal dengan penyakit. Terus produktivitasnya rendah. Sekarang Pak Ketua dengan pelaksanaan yang terus menerus kita teliti dan sudah terbukti banyak dilakukan dengan konsep intensifikasi ini akan menghasilkan produktivitas yang sangat baik. Rata-rata 1 hektar itu bisa menghasilkan 40 ton. Cukup anggap 1 kali Pak Ketua, padahal rata-rata pelaksanaan itu bisa 2 kalinya. Cuma kalau mengacu kepada produktivitas nasional yang selama ini tambak rakyat itu rata-rata tidak sampai 1 ton Pak Ketua. Ini PR terbesar yang akan kami selesaikan segera di periode kami ini. Dan kami berharap dukungan dari. Dan kami percaya Komisi IV akan mendukung kami dalam program ini.

Nah bicara tentang anggaran juga Pak Ketua, karena keterbatasan anggaran kita kami juga boleh untuk menggunakan dana BLU Pak Ketua. Dengan konsep sentralisasi atau clusterisasi. Kami berharap juga diruangan ini, saya yakin Bapak/Ibu Ketua, dan para Wakil Ketua, dan seluruh Anggota Komisi IV punya basis atau punya konstituen yang berada di pesisir-pesisir pulau. Kami juga mohon bantuannya manakala Bapak/Ibu punya binaan. Kami juga memberikan kesempatan untuk menggunakan dana BLU ini sebagai bentuk cluster dan membangun cluster tambak baru yang dimiliki oleh rakyat dengan konsep padat karya. Kalau dulu 1 hektar itu hanya 1 ton

rata-rata kalau di daerah-daerah pesisir di pulau diluar Jawa, para nelayan petambak ini punya lahan sampai 6 hektar, 7 hektar, 5 hektar, yang punya 1 hektar itu sedikit Pak Sudin. Mungkin Sumatera sama Jawa masih termasuk lebih kecil lagi. Tapi intinya kalau kita membangun cluster dengan system intensifikasi tidak perlu lahan yang luas. Kita cukup dengan 2000 meter 1 KK ini sudah menghasilkan pendapatan yang cukup bagus, apalagi kalau konsepnya konsinyasi bergabung dalam kelompok keluarga-keluarga, Kepala Keluarga yang kita jadikan satu sub cluster. Kami sudah punya konsepnya Pak Ketua. Ijinkan kami terus mematangkan dan terus kami melakukan uji coba. Karena sebenarnya kalau dibilang uji coba juga tidak uji coba Pak Ketua. Hasilnya secara intensif itu sudah dibuktikan dan berhasil. Dan yang paling penting dari ini Pak Ketua, selain kita menghasilkan pendapatan produktivitas hasil terus penyerapan lapangan pekerjaan, kita juga akan menghasilkan lingkungan yang lebih hijau lagi. Kenapa? Tambak-tambak yang tadinya luas kita perkecil, yang sisanya itu kita tanami mangrove. Dan mangrove ini juga selama ditanami nanti setelah besar bisa dibudidayakan secara tradisional.

Jadi integrasi antara tradisional dan modern tetap harus berjalan Pak Ketua. Dan ini konsep menangkapnya mungkin tidak dengan dipanen, tapi dengan menangkap secara tradisional, apakah dipancing atau dibubu Pak Ketua. Ini salah satu yang akan terus kita perbanyak. Target kami kedepan 100.000 hektar itu bukan hal yang mimpi, karena potensinya sangat besar apalagi kalau saya lihat ditempatnya Pak Ketua Sudin di Lampung di Tanggamus kemarin saya lihat disitu ada Kepala Sekolah melaporkan potensinya sangat besar, dan tambak dengan sistem intensifikasi dan sistem buffer tradisional ini saya pikir bisa dijadikan juga daerah wisata Pak Ketua untuk wisata.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri,

Maaf saya potong sedikit. Saya sabtu lalu ke Tanggamus, melihat sekolah perikanan disana yang dimiliki oleh KKP. Bagaimana siswanya akan maju kalau pola yang diajarkan itu masih tradisional. 1 bak 1 kolam punya kincir Cuma 2. Saya bilang, bagaimana anda mau mengajarkan yang modern. Bagaimana peningkatannya. Sedangkan yang dipelajari Cuma ya itu-itunya saja tidak ada lagi. Maka saya bilang, usulkan untuk 2021, 1 kolam minimal ada yang super-super intensif. Ini loh yang super intensif, ini yang biasa. Kemarin saya tidak melihat sama sekali. Ya karena keterbatasan anggaran juga. Kebetulan Sabtu saya kesana. Saya sengaja mau lihat apa sih perkembangannya. Dan itu kan politeknik itu stop ya anggarannya karena tidak ada. Jadi saya minta tolong 2021 ditingkatkan. Jadi siswa itu jangan belajar monoton.

Ya silakan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Baik, terima kasih Pak Ketua.

Apa yang Pak Ketua sampaikan, kami kemarin sudah panggil semua sekolah menengah umum kita dan Poltek kita sudah kami ingatkan dan kami matangkan terus Pak Ketua. Jadi intinya, kita punya potensi untuk mendidik masyarakat Indonesia mengerti tentang berbudidaya dan menjadi nelayan yang baik. Intinya adalah tidak hanya mengerti atau pintar, tapi bisa praktek dan bisa menghasilkan bahkan bisa bekerja langsung, tidak harus menjadi Pegawai Negeri untuk kerja.

Dan apa yang Pak Ketua sampaikan itu menjadi catatan kami. Kami langsung tindaklanjuti tiap-tiap seluruhnya kita wajibkan untuk membangun 2 hektar saja dulu Pak Ketua dengan intensif menggunakan dana BLU. Ini sudah dan langsung teken kontrak kemarin. Manakala Pak Ketua dan Wakil Ketua, dan teman-teman Komisi IV akan lebih mendorong memberikan dana bantuan melalui APBN, kami juga akan siap untuk menindaklanjuti. Sebagaimana kita ketahui dalam kondisi COVID sekarang ini Pak Ketua, portofolio, bisnis, industri. Saya yakin yang paling siap adalah di sektor KKP Pak Ketua. Kenapa? Kami bisa buktikan nanti selama kami bisa punya anggaran untuk mencetak tambak kita membuat tambak dengan Rupiah tapi hasilnya nanti dengan US\$ Pak Ketua.

Ini sebagai ilustrasi saja. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan pada saat informal ada 40 ton 1 hektar. Benar Pak Ketua, itu rata-rata. Bahkan bisa lebih 2 kalinya. Saya tidak bicara lebih tinggi dari itu, bahkan mungkin 20 ton saja itu sudah luar biasa. Pakai angka 40 ton Pak Ketua, Kalau harga tambak udang 1 kilonya adalah 5 Dollar, itu sudah ada 200.000, itu 1 hektar. 200.000 hektar Pak Ketua. Kalau ada 1000 berarti itu ada 200 Juta Dollar. Kalau ada 100.000 itu ada 25 Miliar Dollar Pak Ketua. Itu uang yang bisa kita ciptakan dan pasarnya sangat terbuka, dan ini saya bicara ini. Ini kita belum bicara mengoptimalkan pasar dalam negeri. Kenapa saya sangat optimis Pak Ketua, kita semua saksi. Saya yakin Bapak/Ibu, di konstituen juga banyak. Kalau kita makan, coba makanan apa yang pertama kali, lauk apa yang pertama kali habis di prasmanan diacara-acara, pasti udang. Kalau ada udang, ada ikan lele, ada ikan yang lain, pasti udang duluan. Saya pikir ini bukti bahwa udang adalah makanan yang menjadi prioritas dan menjadi kebutuhan bersama-sama. Hanya saja akses dari udang menuju meja makan ini yang perlu kami tingkatkan.

Kami kemarin Pak Ketua atas ijin Pak Ketua, mengajak Anggota Komisi IV Pak Suhardi Duka ke Pasang Kayu, Beliau saksi bagaimana intensifikasi tambak itu juga akan menjadi jawaban kita dengan menghasilkan lapangan pekerjaan. Pak Haerudin kemarin ke Garut Selatan, Pamengpe Itu bukti dan kalau sudah ada bukti, sudah ada fakta, ada potensi. Kami hanya butuh dukungan tambahan modal. Kalau memang ini bisa Pak Ketua, kami sangat yakin. Kalau Pak Ketua, saya yakin Pak Ketua Sudin juga bukan orang yang sembarangan, punya uang cukup banyak. Saya pikir investasi Bapak lebih baik kesini Pak Ketua.

Demikian Bapak/Ibu sekalian. Ini gambaran, yang lain-lain masalah cantrang memang menjadi perdebatan. Kita dalam rangka kedepan adalah ingin bagaimana cantrang ini tetap punya pemberdayaan ekonomi kita.

Menghasilkan nilai ekonomi juga. Ada perdebatan tentang cantrang selama ini. Saya yakin Pak Ketua juga yang selalu mengikuti dari awal. Cantrang dituduh tidak ramah lingkungan. Ini kan hanya cara pandang saja Pak Ketua. Tapi saya sependapat kalau cantrang ini juga tidak boleh diadu dengan nelayan tradisional. Ini kita membagi bagaimana zonasinya, kemudian ukuran alat tangkapnya. Tidak boleh juga terlalu kecil-kecil ukuran jaringnya sehingga ikan-ikan yang kecil masih bisa hidup untuk kita tangkap ditahap berikutnya.

Kalau cantrang bicara tentang merusak karang. Saya pikir dari kasat mata saja kita bisa lihat, cantrang itu dibuat dari tali. Yang kekuatannya juga kan kalau narik karang yang begitu kokoh ya bagaimana mungkin bisa ketarik karang itu. Kan tidak masuk akal kalau dia merusak. Pasti yang pemilik jaring ini juga tidak mau menangkap di karang dan metodenya juga berbeda. Jadi kalau harus debat akan panjang perdebatannya Pak Ketua, tapi kita akan melihat celah. Potensi laut kita masih sangat luas, daerah-daerah perbatasan kita di Zona Ekonomi Eksklusif kapal-kapal kita masih sangat sedikit. Saya pikir dengan pengaturan dan pengawasan yang sangat kuat, kami percaya. Saya yakin kalau kapal asing saja mampu kita tangkap, kita cegah, kita jaga, apalagi nelayan-nelayan kita sendiri. Mereka tidak perlu dijaga. Dikasih pengertian dan dikasih pembinaan.

Jadi Pak Ketua, kami sangat optimis. Kami tetap terus ingin menemukan titik temu, bagaimana ini si cantrang bisa hidup tanpa merusak lingkungan, bagaimana nelayan kecil bisa kita terus kuatkan. Wacana kami juga kedepan Pak Ketua sedang kami hitung. Saya minta Dirjen Tangkap untuk terus memantapkan bagaimana yang ijin-ijin kapal-kapal yang kecil yang 10GT atau 5GT kebawah ini sudah tidak perlu lagi pakai bayar-bayar lagi Pak Ketua, tapi lagi kami ukur dan kami hitung. Kalau memang Kepala Daerah kami akan terus tindaklanjuti. Kenapa Pak Ketua? Kita ingin mendorong bahwa nelayan-nelayan kecil ini sudah tidak perlu lagi aturan-aturan yang terlalu ngejelimet atau melilit mereka. Mereka begitu sudah dicek kapalnya memenuhi dan keamanan, terutama keselamatan lautnya aman kita kasih kesempatan mereka melaut tanpa dihantui oleh rasa takut akan ditangkap atau akan dibui dan ini harapan kami Pak Ketua. Ini saya pikir sumpah kita dalam menjaga nelayan kita.

Pak Ketua, Wakil Ketua, para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan Rapat Kerja kali ini. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi IV DPR RI yang sangat besar kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan mohon persetujuan lebih lanjut terhadap pagu indikatif APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021. Seluruh saran, masukan, dan rekomendasi dari Komisi IV DPR RI akan menjadi bahan acuan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Terima kasih.

Billauhitaufiq Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Selamat pagi, Salam sejahtera bagi kita semua.

Om Shanti Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri,

Perihal cantrang itu adalah di Belanda, di Australia. Saya kunjungan kesana. Kapal troll itu masih ada. Masih bolehkah? Boleh. Tetapi wilayah tangkapnya jelas dan tidak ada modifikasi. Kalau orang Indonesia kan paling jago, paling pintar memodifikasi suatu alat hingga tidak memikirkan ramah lingkungan atau apa yang penting dapat sebanyak-banyaknya.

Kemudian tadi dikatakan 5GT dan 10GT tidak perlu ada perijinan. Saya sangat setuju untuk pertama kali dibuat dulu yang 5GT, tidak usah ada perijinan tetapi tetap pengawasan, keselamatan Nomor 1. Setelah dievaluasi baik, baru kita tingkatkan yang 10GT tanpa ijin. Karena bagaimana pun pemilik 5GT kan rata-rata pemilik langsung, bukan majikan, bukan juragan. Kenapa saya tadi bicara masalah cantrang? Karena kita ini diserang terus. Kementerian Kelautan diserang, berarti yang tidak efektif pengawasannya dari Komisi IV. Begitu juga dengan lobster di ekspor itu, Ini kan kita diserang media. Semua media tanya saya, saya bilang saya belum dapat jawaban yang pasti dan pas dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Saya tidak melihat Pak Sekjenya ya Pak Menteri ya.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Mohon ijin Pak Ketua.

Tadi pas dari sini ada tugas mendadak yang memang harus saya tugaskan Pak Ketua. Mohon ijin sekali ada hal yang penting. Nanti saya ceritakan ke Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Dan satu lagi yang paling penting adalah saya minta setiap PERMEN diterbitkan itu dikirimkan ke Komisi IV. Waktu itu saya sudah minta. Kenapa? Supaya nanti gunanya adalah supaya teman-teman kalau pulang ke Dapil ada pertanyaan dari masyarakatnya, dari rakyatnya. Kenapa kami tidak boleh begini, nah ini peraturannya. Kenapa situ boleh, ini peraturannya, Paling tidak kan, jangan dianggap kami ini tidak peduli. Ya tolong segera PERMEN-nya dikirimkan termasuk juga nanti setelah ada DIPA yang Tahun 2020 sudah selesai tolong satuan tiganya dikirimkan juga sebagai bentuk pengawasan kami.

Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan.

Selanjutnya kami persilakan kepada Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya.

Kami persilakan Pak Budi.

KETUA RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Menteri yang kami hormati, jajaran Eselon I.
Selamat siang.

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih atas segala penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Sedikit saja dari saya sebelum saya alihkan kepada para Anggota. Tadi Pak Menteri sempat menjelaskan mengenai kebutuhan-kebutuhan yang sangat didambakan oleh nelayan-nelayan kita se-Indonesia. Salah satunya yaitu aturan-aturan yang perlu diperjelas tapi juga dipermudah. Intinya supaya nelayan-nelayan kita bisa mencari nafkah. Kebetulan kemarin saya baru menerima kelompok nelayan dari Buton yang menyuarakan aspirasi bahwa kelompok-kelompok nelayan ini sering dipersulit, bukan Cuma aturan tapi karena mungkin minimnya sosialisasi akhirnya suka dikerjai oleh aparat-aparat di Buton, Sulawesi Tenggara.

Jadi mereka sebenarnya pada intinya coba Pak Budi, bagaimana kita ini sebenarnya apalagi di situasi pandemi Covid-19 ini bisa mencari nafkah lebih mudah. Tapi yang kita inginkan tentunya aturan-aturan itu jelas dan juga terlaksana dan dilaksanakan dengan baik Pak Menteri. Kami terima kasih. Dan saya sambut baik beberapa hari lalu, Pak Menteri juga telah menyatakan mengenai kapal-kapal, penenggelaman kapal Pak Menteri sudah tidak menjalankan itu lagi melainkan itu akan nanti dialihfungsikan diberikan kepada nelayan-nelayan yang membutuhkan karena banyak sekali nelayan-nelayan kita masih membutuhkan kapal-kapal tangkap, Kami sambut baik. Dan saya rasa saya setuju tadi oleh Pak Ketua juga mengenai anggaran tahun depan. Ya kita minta teman-teman yang di Banggar khususnya ini bisa diperjuangkan untuk ditingkatkan lagi.

Kemarin itu saya dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, saya menjelaskan ada 1 data dari BPS Pak Menteri. Dari BPS itu menjelaskan mengenai ekspor-impor komoditas pangan, mungkin selama 5 tahun dari 2015 sampai 2019. Jadi hampir disetiap komoditi pangan, kita masih sebagian itu impor semua. Yang kita benar-benar secara konsisten dari tahun ke tahun untuk ekspor itu adalah produk-produk perikanan kita. Maksud saya ya inilah yang kira harus dorong sebagai penunjang devisa negara kita. Saya rasa sangat penting kalau kita perjuangkan anggaran yang lebih besar lagi untuk KKP tahun depan. Mungkin tahun ini kita terdampak pembatasan karena keadaan, tapi saya yakin saya optimis kalau kita bersama-sama kita nanti tahun depan kita bisa perjuangkan supaya nilai ekspor dari produk

perikanan kita bisa kita tingkatkan lagi. Betul, kita masih ekspor produk-produk lain tapi kalau kita melihat neraca perdagangannya kita masih lebih banyak impor daripada eksportnya. Ini seperti kedelai, jagung, gula. Ini faktanya, kecuali perikanan ini. Perikanan dari tahun ke tahun kita benar-benar *nab eksporter*. Ini yang ingin tunjang, kita ingin perjuangkan lagi.

Saya rasa itu demikian sedikit dari saya. Mohon maaf kalau menyita waktu teman-teman.

Saya persilakan untuk yang pertama Pak Muslim Fraksi Demokrat.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua, Wakil Ketua dan teman-teman Anggota Komisi IV, Menteri dan jajarannya.

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pertama tentu Pak Menteri, saya ingin mengapresiasi Kementerian KKP yang mana kinerja anggarannya di Tahun 2019 sangat memuaskan yaitu diatas 90% ya, dan tidak adanya temuan. Saya pikir ini satu hal yang luar biasa. Tentu kita harapkan ini juga bisa dipertahankan semaksimal mungkin kedepan.

Kemudian yang kedua, ini saya melihat ini ada keinginan dari KKP yang akan melegalkan khususnya sekitar 8 jenis API ya, Bapak Menteri. Itu termasuk salah satu cantrang dan pukot cincin. Dalam konteks ini tentu harapan kita adalah di satu sisi masyarakat ini sangat berharap dalam konteks cantrang ini. Namun demikian tentu dalam hal ini kebijakan Pak Menteri ini harus betul-betul selektif betul Pak Menteri. Kenapa? Kita tahu betul punya pengalaman kita berkaitan pukot harimau. Itu bagaimana dulu terhadap pukot harimau sangat liar jadi sehingga itu sampai ikan-ikan kecil semua diangkut. Ini menjadi perhatian. Kita sepakat hari ini bagaimana meningkatkan daripada penghasilan dari nelayan, saya sangat mendukung Pak Menteri sepenuhnya. Namun demikian dalam hal regulasi berkaitan dengan pemanfaatan ini betul-betul diawasi secara ketat, jadi sehingga betul-betul tidak merugikan daripada nelayan itu sendiri.

Kemudian yang ketiga yaitu berkaitan dengan *illegal fishing* yaitu pengawasan kedaulatan laut dan perikanan. Tentu kita tahu betul Pak Menteri, di Aceh itu luas sekitar 295.000 Km² dengan garis panjang sekitar 2666 Km nah itu potensi perikanan sangat besar. Kita tahu betul kondisi Aceh hari ini yang paling banyak adalah terjadi pencurian ikan khususnya dari nelayan-nelayan Thailand maupun beberapa negara lain. Kita berharap bahwa pengawasan dari KKP ini, ini betul-betul. Kenapa? Karena Aceh kan langsung Pak Menteri berhadapan dengan khususnya beberapa negara.

Terakhir berkaitan dengan tambak. Saya sangat sepakat tadi, ada babak baru Pak Menteri. Kita tahu betul, hari ini banyak sekali tambak-tambak udang di Indonesia apalagi di Aceh Pak Menteri, ini sangat sudah terlantar.

Tapi ketika Pak Menteri menyampaikan beberapa hal tadi artinya ada suatu prospek baru. Kita tahu betul ini problem di tambak udang selama ini persoalan penyakit Pak Menteri. Nah ini kita harapkan dalam program dari Kementerian KKP di 2021 kita harapkan ini menjadi perhatian khusus terhadap persoalan tambak udang ini, karena kita tahu betul ini salah satu memberi dampak maupun peningkatan pendapatan petani khususnya petambak udang ini bisa maksimal. Salah satu saya berharap Pak Menteri, ada pelatihan, kemudian permodalan. Kenapa? Karena selama ini terus terang kadang-kadang 1 petani itu bisa sampai punya 10 hektar, 6 hektar tapi hasilnya itu sangat minim.

Tadi Pak Menteri katakan 2000 itu bisa menghasilkan 10 ton coba bayangkan, berarti kalau 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Namun demikian kita berharap apa yang disampaikan Pak Menteri ini, ini harus dijabarkan kepada masyarakat khususnya para petambak udang, bagaimana program-program, bagaimana mereka diberikan pelatihan, kursus segala macam. Jadi sehingga termasuk bagaimana mengelola tambak udang secara intensif. Nah tentu dalam konteks seperti yang kita harapkan program-program ini betul-betul menyentuh kepada masyarakat. Saya sepakat Pak Menteri. Saya siap turun nanti ke Dapil. Kita ingin berikan pelatihan kepada mereka dan pihak Kementerian ikut, kemudian Dinas terkait di Kabupaten dan Provinsi ikut terlibat. Jadi kita harapkan setahun demikian kelihatan betul Pak Menteri, bagaimana tambak-tambak udang mulai bergeliat kembali dan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan memberikan kesejahteraan kepada nelayan itu sendiri.

Terima kasih Pak Budi.

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Muslim terima kasih.

Berikutnya Pak Andi Akmal Pasluddin. Kami persilakan Pak Andi.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Terima kasih Pak Andi.

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati, Pak Menteri Pertanian dan jajarannya. Menteri Kelautan dan Perikanan. Ini karena baru kemarin Pak Ketua, Pak Menteri kita rapat. Jadi masih ingat rapat kemarin. Dengan Pak Edhy kan kita sudah sama-sama 5 tahun di Komisi IV. Jadi agak lupa kayaknya.

Yang pertama Pak Ketua, saya ingin sedikit dari laporan tadi saya tidak mendengar pemaparan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kita hanya bicara belanja dan belanja, sehingga negara kita ini defisitnya cukup besar.

Sudah lebih dari 1000 Triliun sekarang defisit kita. Nah sehingga mungkin mendengarkan nanti progress PNBPN kita dari 2019, 2020 dan 2021 rencananya Pak. Karena PNBPN ini Pak Ketua dan juga Pak Menteri bukan hanya menjelaskan pendapatan. Tapi kita ingin melihat ada bisnis yang berjalan, Penerimaan Negara Bukan Pajak. Selama ini kan Menteri lama mengeluhkan kenapa PNBPN rendah karena adanya *markdone*, adanya upaya dari para pemilik kapal untuk menurunkan laporan tonase kapalnya sehingga tidak memberikan kontribusi untuk PNBPN. Nah kita ingin mendengarkan dari Pak Menteri, PNBPN ini. Dan saya berharap 2021 nanti PNBPN-nya naik. Karena dari Undang-Undang PNBPN ini kan 30% untuk operasional daripada Kementerian terkait. Jadi istilahnya keluhan tadi Pak Menteri mengatakan bahwa anggarannya kecil, kita sepakat dan saya juga mendukung untuk tambahan Rp3,45 Triliun ya. Karena sebagaimana kita ketahui 2014 atau 2015 itu anggaran KKP Rp11 Triliun. Nah ini kan cukup, meluncur turun kebawah ya hanya 5 Triliun.

Oleh karena itu Pak Menteri dan jajaran. Perlu kita memberikan narasi yang kuat kepada Presiden, kepada Menteri Keuangan dan Bapenas bahwa sector kelautan dan perikanan ini sangat penting. Ya kan kita ini resiko DPR saya kira tidak ada masalah Pak, Banggar, kemudian kita disini kita mendukung pasti KKP. Tapi Presiden dan Menteri Keuangan ini juga perlu tahu bahwa KKP ini sangat penting. Dan sekarang ini terbukti Pak Menteri bahwa yang bisa ekspor ini ya produk perikanan kita. Ini kan luar biasa sebenarnya, Cuma ini belum sampai ke kepala mereka. Daripada 6 Triliun ini untuk pelatihan prakerja yang tidak jelas ya mending diberikan kepada sector perikanan dan kelautan. Jadi sebenarnya banyak ini dianggarkan negara kita ini tidak efektif-efisien tapi itu yang ditambah anggarannya gitu. Sementara yang penting ini malah dikurangi anggarannya. Jadi Pak Menteri tidak usah ragukan kami. *Insha Allah* kita akan suarakan terus ya melalui kewenangan kami dimedia maupun ditempat yang lainnya.

Kemudian untuk masalah isu-isu terkait Pak Menteri. Ini hanya masukan dari Nusa Tenggara Barat mengenai masalah rencana untuk ekspor benih lobster. Nah ini ada beberapa masukan, Kita tadi sudah jelaskan alasan Pak Menteri kita pahami karena alasan COVID-19. Cuma ini ada bebeapa usulan agar sebelum jadi keputusan Menteri diperhatikan mengenai masalah PNBPN-nya yang dirasa cukup besar. Katanya 2000 per ekor ya Pak ya. Ini apakah baru rancangan atau baru menjadi keputusan. Ini dirasa oleh nelayan di Nusa Tenggara Barat kebesaran 2000 per ekor sebenarnya. Karena ternyata menyulitkan mereka. Yang kedua, kalau dibatasi mereka hanya 1500 per tahun ya mereka menghitung berarti sehari berapa ekor yang bisa ditangkap itu. Ini nelayan kecilnya maksudnya. Apakah memang ada dalam aturan ini, kan baru rancangan Pak Cuma ini aspirasi yang kami sampaikan kepada Menteri agar menjadi kajian nanti kedepannya agar kebijakan yang melonggarkan ekspor ini berdampak pada kesejahteraan daripada nelayan kecil kita. karena kalau ini terlalu banyak aturannya juga nanti penyelundupan juga akan semakin banyak Pak. Terlalu banyak aturan-aturannya, penyelundupan juga akan semakin banyak.

Kemudian yang terakhir Pak Menteri mengenai masalah penangkapan illegal fishing kita dukung Cuma perlu juga kita tampilkan ke publik Pak, 50 kapal itu yang mana saja, dan bagaimana aturan nanti penyerahannya kepada Kampus atau kepada nelayan. Jangan sampai ini kan menjadi pertanyaan besar kita. Ini diserahkan kepada siapa? Aturannya mana, pengusaha siapa. Jadi ya kalau mengenai Bapak mau tenggelamkan tidak tenggelamkan ya itu urusan teknis itu ya. Tapi yang jelas bahwa pelaksanaan illegal fishing ini betul-betul berjalan dan kita buktikan kepada publik masyarakat dan DPR bahwa kita berhasil menangkap kapal-kapal asing ini dan kita tidak biarkan laut kita dimasuki oleh kapal-kapal ilegal maupun kapal-kapal asing.

Saya kira demikian Pak Ketua yang bisa disampaikan.

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Andi.

Tadi saya tangkap ada 1 kata sebenarnya dari Pak Andi itu narasi. Ini saya rasa sangat penting Pak Menteri supaya narasi yang dibangun khusus di KKP ini bisa dibangun dengan benar dan kita supaya bisa bekerjasama supaya narasi yang benar itu bisa terdengar oleh Presiden dan khususnya Menteri Keuangan.

Terima kasih.

Berikutnya kami persilakan Pak Abdullah Tuasikal dari Fraksi NasDem.

F-NasDem (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan, rekan-rekan Anggota Komisi IV DPR RI, Pak Menteri beserta jajarannya.

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jadi pertama sekali, saya mengucapkan terima kasih pada Menteri beserta jajarannya. Karena sudah ada dukungan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Saya bersyukur bahwa sudah ada dukungan dan mudah-mudahan dukungan ini dan Maluku memiliki potensi yang kita lihat di beberapa WPP yang saya sering jelaskan, dan mudah-mudahan Maluku ini tidak dijadikan seperti sekarang. Ada potensi tapi pendaratan ikannya itu harus di Bitung, ke Jawa Timur, dan lain-lain. Sehingga kedepan ini saya kira tempat-tempat pendaratan ikan yang sudah dibangun agar menjadi perhatian. Lalu habis itu mungkin industri seperti pengalengan ikan juga mudah-

mudahan menjadi perhatian. Saya kira bukan sekarang, Tapi ini mudah-mudahan menjadi perencanaan. Perencanaan tiap potensi yang ada di Maluku Utara dan Papua ini kita mau seperti apa. Memang benar bahwa potensi di negara kita ini budidaya ikan air tawar maupun tuna dan lain-lain saya kira semua memiliki potensi. Sekarang juga harus menjadi perhatian. Semuanya harus menjadi perhatian dan ini ada pada Provinsi-Provinsi tertentu yang memiliki potensi ini. Untuk itu pembangunan itu agak merata, Maluku juga benar-benar harus memiliki perhatian karena ini bukan soal Malukunya tapi potensinya yang ada di Maluku ini, itu bagaimana kita harus garap. 12 juta ton sekian harus kita garap. Ini juga menjadi devisa nasional, dan juga mau memberdayakan masyarakat yang ada di Maluku. Kondisi yang ada Pak Menteri sekarang, sekarang masyarakat nelayan juga sudah malas. Karena harga ikan pun sudah seperti ini. Ada ikan tapi ikan juga tidak bisa didistribusi keluar. Jalan keluarnya yang saya katakan pembangunan industri sangat cukup penting.

Lalu yang kedua, saya bersyukur kalau soal rumpon ini sudah, yang saya usulkan juga sudah terjawab, sudah dibicarakan di KKP.

Lalu yang ketiga ini soal moratorium yang ada di Banda. Saya lupa WPP, berapa saya lupa. 714 ya? Ini kan juga jadi masalah khususnya di masyarakat Banda dan sekitarnya. Ya untuk kepentingan nasional itu jelas bahwa 20% ikan tuna bertelur disana, itu harus jelas. Nah ini untuk kepentingan nasional. Tapi untuk kepentingan masyarakat yang ada disana itu seperti apa. Harus sosialisasi, karena masyarakat juga tidak mengerti. Makanya waktu RDP berapa bulan yang lalu, saya jelaskan saya khawatirkan kalau PERMEN ini keluar dan moratorium memang yang diadakan masyarakat tidak dicabut atau pelarangan itu memang benar-benar dilarang, itu maka bisa terjadi insabilitas antara masyarakat dengan petugas.

Lalu yang satu lagi Pak Menteri, sebenarnya sudah ada moratorium tapi kapal penangkap ikan masyarakatnya sudah ambil karena yang dikejar adalah ekor kuning. Coba dicari solusinya seperti apa, negara kepentingan ikan tuna bertelur disana saya kira itu cukup penting. Tapi kepentingan masyarakat itu kira-kira apa.

Saya kira itu. Saya kembalikan ke.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Pak, saya minta diulangi yang Tuna ekor kuning. Maksudnya Bagaimana itu Pak?

F-NasDem (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Jadi sebenarnya tunanya tuna ekor kuning ini, itu pada saat Bulan Oktober sampai Bulan Desember itu sudah diatas 100 kilo dan itu potensi tuna ada pada bulan-bulan itu. Dan kalau masyarakat tidak dilarang untuk ambil nah ini kan jadi masalah yang ada disana. Untuk itu jalan keluarnya seperti apa, dan saya kira PERMEN ini sebelum diketok atau disahkan, saya

harapkan agar mungkin Kementerian Perikanan dan Kelautan mencoba sekali lagi minimal sosialisasi atau apa yang diharapkan oleh masyarakat kalau aturan ini tidak berlaku ya Pak Menteri ya. Saya tidak cerita banyak, Cuma saya berharap agar potensi yang ada di Maluku ini. Saya tidak usah bicara soal budidaya air tawar, karena potensi semua. Kita harus bangun semua. Tapi Maluku saya minta untuk juga menjadi perhatian Pak Menteri. Saya tidak cerita banyak tapi saya kira itu adalah cerita saya. Nanti silakan dari Kementerian program dalam kegiatan-kegiatan anggaran. Karena saya lihat di 2021 ini belum bisa menjawab untuk kepentingan Maluku. Tapi saya maklum.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Tuasikal. Sudah cukup saya rasa ya.

F-NasDem (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Sedikit lagi ya.

Saya maklum karena anggarannya masih seperti ini. Kalau anggarannya membaik saya harap ada perhatian untuk Maluku.

Saya kira demikian Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Abdullah Tuasikal.

Berikutnya Pak Haerudin.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan, Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati, Pak Menteri KKP beserta seluruh jajaran para Pejabat dilingkungan Kementerian Kelautan juga yang saya hormati beserta mitra-mitranya yang hadir, ada PT Garam, Perum Perikanan Indonesia, PT Perikanan Nusantara.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ingin kami sampaikan kepada Bapak-Bapak terutama Pak Menteri, catatan kita adalah dari potensi kita ratusan ribu ton yang dimiliki untuk tangkap ikan kita sampai hari ini belum maksimal.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Jutaan Pak.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

dan kehidupan masyarakat kita adalah.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Jutaan Pak. 12,5 juta.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Jutaan ton. Bahkan ada sampai menyebut sampai 2500 atau 3000 Triliun potensi dari tangkap kita kalau itu bisa dimaksimalkan. Ini kan bacaannya bacaan optimismenya. Atau bacaannya bacaan idealnya. Jadi antara idealisme dengan kenyataan, nanti bisa dilihat Pak Menteri. Sampai hari ini data BPS penduduk kita 25,9 juta yang miskin itu adalah satunya nelayan. Hari ini Indonesia bangkrut Pak Menteri ya. Bukan inflasi, bukan deflasi dengan bencana wabah ini bangkrut kita itu. Nah tentu butuh bangun optimismenya. Modal kita keyakinannya dan optimismenya. Kalau modalnya uang apa yang tertera yang tadi dari pagu indikatif kita, kita sangat pesimis kalau ada yang mengambil dari posisi nilai uang atau jumlah uang.

Ingin kami sampaikan Pak Menteri bahwa membangun itu tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh proses, butuh perjuangan dan butuh berpikir lebih komprehensif, contoh udang vaname itu menjanjikan. Tapi bukan nelayan kecil yang dapat, punya proyeksi udang vaname yang ada di kita itu. Mereka adalah orang-orang yang punya duit. Tentu bagi nelayan itu belum tentu mendapatkan ruang yang pantas, yang layak sehingga membangun kehidupannya lebih baik. Saya ingin lihat bahwa resiko dari tambak udang itu adalah dari sisi lingkungan. Pertama kalau memang tidak disiplin para pengusaha tambak ini, yang rusak adalah ekosistem laut, baik rumput, baik karang, baik terumbu karang, baik lingkungan, dan ikan itu menjauh dari pinggiran pantai. Dan bagi nelayan kecil kita yang perahunya tongkang itu susah lagi mendapatkan tangkapan ikan. Ini resiko loh yang dihadapi. Maka Pak Menteri, terutama Bapak Jenderal Budidaya ini Pak Slamet yang sudah beberapa periode selamat terus di Dirjen Budidaya terus Slamet namanya. Pak Sudin ya. Aku belum pernah mendengar Pak Sudin marah sama Pak Slamet. Karena Pak Slamet dari awal sudah selamat. Selamat Pak Sudin, selamat Pak Sudin. Jadi tidak ada gebrakan meja untuk Pak Slamet. Aman Pak.

Saya lanjutkan ya. Bahwa nah inilah kondisi kenyataan dari tambak udang. Boleh mungkin yang di Lampung atau yang di Jabar Selatan, atau yang di Jabar Utara. Bukan pada persoalan kita harus mundur. Tapi peningkatan disiplin orang-orang para pelaku budidaya inilah yang harus ditingkatkan. Jangan sampai kehadiran udang vaname merusak kehidupan keseharian para nelayan kita. Yang itu justru lebih memiskinkan nelayan kita. Yang diharap kita itu bisa meningkatkan kesejahteraan. Pak kenyataannya malah berbanding berbalik para nelayan kita lebih jatuh miskin. Ini kenyataan loh. Saya ingin sampaikan yang di Jabar Selatan Pak Menteri, hadir saya kemarin pada tambak udang. Saya kagum, hebat, tinggal kita disiplinnya

bagaimana, lingkungan itu betul-betul terbawa kaya, terbawa sejahtera. Kalau kita mendengar optimis dari Pak Menteri, Rupiah jadi Dollar kita juga ingin seperti itu tentu, kita semangat disitu. Maka dari awal saya sampaikan kita punya keyakinan, kita punya optimisme adalah modal terbesar yang dimiliki kita hari ini setelah kita bangkit dari kebangkrutan ekonomi kita hari ini. Yang itu dengan kebangkrutan itu bertambahnya kemiskinan di negara kita ini.

Yang kedua tentu pertanyaan yang mendasar sampai hari ini yang bisa belum terjawab oleh siapa pun di negeri kita adalah kenapa nelayan kita terus melarat, kenapa nelayan kita terus dalam kemiskinan, kenapa nelayan kita susah beranjak dari ketidakberdayaannya. Tentu banyak hal yang melingkupi yang menjadi masalah, yang menjadi latar belakang terjadinya kenyataan kehidupan nelayan kita. Bukan hanya persoalan akses, bukan hanya sumber daya manusia, bukan hanya kebijakannya tapi mungkin butuh berpikir komprehensif. Dari sisi cuaca resikonya jauh lebih besar. Mereka yang saya mendengar dulu kita janjikan ya karena tsunami yang perahunya rusak berat sampai hari ini kita belum tentu kita bisa selesaikan janji kita. Pak Zul, Kementerian KKP pernah berjanji akan membantu perahu-perahu yang rusak oleh tsunami, apa sudah selesai atau belum? Perbaikannya? Perbaikannya. Apa itu sudah dilakukan atau tidak. Kalau tidak mereka itu tidak akan mungkin bisa bangun pelabuhan sendiri. Kitalah pasti yang harus melakukan itu. Saran saya kepada Pak Menteri tentu dengan segala hormat, fokus mana yang akan kita dorong hari ini. Kalau semua ingin kita begini, semua ingin kita dorong dengan kenyataan modal kita yang dimiliki seperti ini tentu amat berat. Tapi ingin saya sampaikan kepada Pak Menteri, fokus mana KKP yang akan dibesarkan per tahun. Jadi ini selesai a., selesai b., selesai c., walaupun selesai tidak sempurna itu hal biasa. Tapi paling tidak ukuran-ukuran tertentu kita sudah selesaikan tahap demi tahap.

Terima kasih Pimpinan. Terima kasih Pak Menteri.

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Haerudin.

Berikutnya Pak Ono Surono. Kami persilakan Pak.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang saya hormati Pimpinan, Pak Sudin, Pak Budi. Katanya tadi disinggung tuh pada saat ada Wakil Presiden rapat ngomongnya sambil dibuka. Jadi bagaimana dibuka atau ditutup. Oh buka saja.

Ijin Pak Menteri.

Yang saya hormati Pak Menteri beserta seluruh jajarannya.

Terima kasih Pak Menteri yang saya hormati. Di penghujung bulan Syawal ini saya masih ingin menyampaikan “*Minal Aidzin Wal'faidzin*”, Mohon Maaf Lahir dan Bathin” kepada seluruh Menteri dan jajarannya, kawan-kawan Komisi IV.

Yang pertama Pak Menteri, ini terkait dengan cantrang. Sejak 5 tahun kemarin saya tidak pernah menyatakan saya setuju atau tidak setuju cantrang. Saya secara tegas yang saya tidak setuju bagaimana regulasi PERMEN itu tidak melalui sebuah kajian yang komprehensif, tidak melalui *public hearing*, tidak melalui konsultasi publik.

Nah terkait dengan cantrang secara teknis, semua kita tahulah mungkin yang di KKP. Kalau dulu saja itu diikuti oleh nelayan ya tidak akan merusak dengan spesifikasi atau jaringnya minimal 2 inch, panjang parit lambarnya 500 meter, operasinya dibatasi, tidak akan merusak. Tapi kenyataannya kan prakteknya dilapangan spesifikasi itu tidak dijalankan.

Nah kemarin sempat dicoba, nelayan dikirim ke Natuna. Dari awal saya sudah menyatakan ini rugi. Di beberapa media saya sampaikan. Jadi kalau nelayan yang maksa berangkat kesana, cantrang rugi karena spesifikasi cantrang itu tidak di laut dalam. Pak Aryo mungkin di 60 meter mungkin wilayah yang cocok untuk cantrang. Jadi di area di 12 mil kebawah. Nah sehingga pada saat rugi, Jangan sampai ini juga jadi justifikasi bagi Pemerintah, bagi Pak Edhy bahwa kok cantrang ke Natuna rugi berarti tidak produktif apa, akhirnya dibolehkan saja, Nah tidak bisa juga jadi justifikasi. Nah sehingga apa yang kemarin saya dengar, ada konsultasi publik apa segala macam.

Yang saya tanya apakah sudah ada kajian? Bukan sekedar konsultasi publik karena saya tahu isinya pasti pro kontra, hampir berantem juga didalam. Yang pro dan kontra di nelayannya sendiri masih terjadi sampai saat ini, tapi apakah sudah ada kajian yang komprehensif baik secara teknis, baik secara lingkungan, dan dampak sosial ekonomi. Jadi mohon cantrang ini kalau tidak salah belum disahkan ya Pak Menteri ya. Ya ini harus hati-hati. Kembali harus bagaimana pada akhirnya regulasi ini yang kita semua sepakat tidak dilarang tapi diatur, benar-benar nih bisa dijalankan oleh nelayan, oleh Pemerintah.

Nah bicara cantrang ini kan saya sempat ngomong, ini mah bicara Jawa Tengah saja sebenarnya. Pada saat bicara daerah lain masih banyak Pak yang lebih harus ada perhatian Pemerintah. Misalnya di Cirebon, ada sekitar 4000 alat tangkap jenis garok yang hampir setiap bulan terjadi konstalasi bentrok antar nelayan. Indramayu arad, kemarin saya sempat ke Eretan disana kita fasilitasi hampir berbenturan antara nelayan arad dengan nelayan jaring udang. Ini tidak pernah tersentuh juga. Walaupun kewenangannya bukan kewenangan KKP secara langsung. Karena ijinnya pun tidak ada, Kabupaten, Provinsi, dan biasanya mereka dibawah 5GT kapalnya. Dari dulu dari jaman Bu Susi saya bilang, ngurusin cantrang saja capek sebenarnya. Tapi ada beberapa nelayan lain yang harusnya lebih diperhatikan karena konfliknya cukup tinggi tadi juga. Nah sehingga tadi

kawan-kawan yang diawal bicara cantrang, cantrang, cantrang. Cantrang itu hanya 1 jenis. Dari kemarin 17 atau berapa jenis alat tangkap yang dilarang kemarin. Dan faktanya ada beberapa jenis alat tangkap yang sudah dilarang dari dulu arad, garok, apolo masih juga beroperasi.

Nah sehingga saya harap Pak Menteri, saya tadi menyikapi Pak Sudin bukan hanya kita diberikan PERMEN yang sudah ditetapkan, tapi paling tidak ada mekanismelah seluruh Anggota Komisi IV DPR RI ini diikutsertakan juga misalnya dalam konsultasi publik. Terlepas mereka mau datang atau tidak. Kan tidak semua tidak mengerti terkait dengan cantrang, arad, garok, dan yang lainnya.

Nah yang kedua, ini terkait dengan benih lobster. Bicara terkait dengan nelayan memang kebanyakan nelayan kecil. Tapi bicara lobster, ini bicara korporasi, tidak berdiri sendiri-sendiri ada jaringan yang dibangun. Nelayan kecil itu hanya sebagai objek saja menurut saya. Yang paling menguntungkan adalah korporasinya. Yang kemarin kita lihat pada saat dilarang, toh penyelundup juga masih banyak, dan itu sangat benar-benar dilindungi. Makanya dari dulu sampai sekarang saya mendengar bahwa ada mohon maaf, oknum-oknum yang bermain didalam situ ada setoran-setoran yang diberikan. Ini menjadi bisnis yang sangat menjanjikan buat korporasi.

Nah sehingga Pak Menteri, saya pun mohon karena ini tadi dibilang sudah disahkan. Sudah disahkan yang lobster ini. Tinggal menunggu peraturan PMK-nya terkait dengan pajak. Nah ini hati-hati juga. Kalaulah kita sudah bisa menghitung misalnya 1 tahun berapa sih stok benihnya, Kalau tidak dimanfaatkan berapa sih yang akan terus hidup dan akan mati. Nah tapi kan kita perlu menghitung bagaimana stok kelestarian lobster ini juga perlu dijaga, dan tadi banyak orang atau banyak korporasi yang sebenarnya sangat diuntungkan dengan hal ini. Nah sehingga saya mengedepankan ingin Pak Menteri membuat skema, membuat program terkait dengan budidaya. Jadi budidaya yang harusnya didorong.

Berapa menit lagi? 1 menit lagi.

Yang selanjutnya terkait bencana banjir rob. Nah kemarin di Pantura Jawa semua kena banjir rob. Dan ini ada dampak Pak Menteri, Pak Slamet terkait dengan kerugian nelayan-nelayan tambak. Nah tadi saya lihat sudah ada realisasi terkait dengan asuransi untuk petambak. Ini baru 7.316. Di Indramayu saya kumpulin kemarin itu, yang rugi-rugi itu. Mereka jangankan ikut, tahu saja tidak. Mereka tahu program ini saja tidak. Mohon ada tanggapan nih seperti apa nih. Karena memang kerugiannya sangat bermacam ragamlah besarnya.

Nah selanjutnya terkait dengan saya telepon Pak Menteri ke Pak Zulfikar. Mungkin 3 hari yang lalulah. Ada konstalasi konflik di Kabupaten Indramayu terkait kapal. Tapi Pak Zulfikar sibuk tapi tadi saya sudah ngobrol. Jadi kapal-kapal yang ijinnya dilaut Natuna ada puluhan kapal, dengan fasilitas yang terbatas di Indramayu karena Cuma berstatus pelabuhan pangkalan pendaratan ikan, Kapalnya itu kan 150GT. Nah sehingga dari sisi

fasilitas di Indramayu ini tidak menampung yang pada akhirnya berakibat harga ikannya juga tidak mendukung. Sehingga mereka bongkar ikannya juga di Muara Angke, Muara Baru. Nah mereka pulang ke Indramayu itu dijaga oleh polisi, Satpol PP, apa, dipalang sama kapal tongkang di depan muara. Karena apa? Mereka dituduh tidak melelangkan ikannya di Indramayu melanggar Perda. Nah saya sampaikan kalau menurut saya, saya bilang tidak ada Perda mengatur pada saat kapal masuk kosong itu terus ditindak, tidak ada. Kecuali kapal itu masuk bawa ikan tidak menjual ikan di TPI, menjual ikan di orang lain tanpa dipungut retribusi baru kena tuh. Nah tapi ada aturan informasinya di Kementerian PERMEN Usaha Perikanan Tangkap Pak. Walaupun yang kemarin belum jelas mengatur tetapi di draft PERMEN yang baru itu mengatur bahwa kapal harus bongkar muat ikan misal bongkar ikan di pelabuhan pangkalan.

KETUA RAPAT:

Pak Ono bisa dipersingkat Pak Ono.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Ya satu lagi. Jadi saya mohon ini diberikan solusi, dikecualikanlah bagi daerah yang tidak mempunyai fasilitas pelabuhan perikanan Samudra atau Nusantara mereka bisa bongkar ikannya di Pelabuhan yang lain. Jangan dipaksa karena pasti rugi Pak, harga ikannya pasti akan sangat rendah tidak akan bisa ketampung.

Nah yang terakhir. Pak Budi satu lagi, saya ingin penjelasan yang terkait dengan tindak lanjut pembangunan Pangandaran *Integrated Aquarium and Marine Research*. Kemarin saya sudah kesana, Ini kalau tidak diselesaikan ini akan terbengkalai dan kerugian bagi kita semua. Jadi Pak Edhy, walaupun itu daerahnya Bu Susi. Bu Susi pernah KKP ya tolong diselesaikanlah Pak. Jadi biarlah ini menjadi catatan sejarahlah Ibu Susi dan Kementerian Kelautan yang kemarin. Jadi paling perlu sekitar 40 sampai 50 Miliar lagi ini Pak.

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ono.

Berikutnya Ibu Riezky Aprilia.

Mohon diperhatikan waktu ya teman-teman.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Mohon Maaf Lahir Batin kepada Pak Menteri beserta jajarannya. Yang pasti kami disini mensupport Pak yang tadi Bapak Menteri sampaikan, tadi Bapak Pimpinan, Bapak Sudin sudah menyampaikan terkait penekanan terhadap *upgrading* anggaran untuk KKP kedepan. Hanya memang perlu saya garisbawahi, penting juga KKP juga selektif dalam bicara program kerjanya. Dalam arti kata kebiasaan projek fisik yang tidak selesai ini di stop dulu karena kita bicara tingkat kesejahteraan nelayannya yang perlu kita pikirkan. Jadi penting sekali ini. Saya yakin Komisi IV bersepakat akan hal tersebut, akan tetapi kita lebih *straight* meningkatkan tingkat kesejahteraan kehidupan para nelayan.

Nah kemudian, untuk Dirjen PDS, saya kemarin itu dari hasil saya Reses ada penting juga kedepan kelompok masyarakat ini juga kita dorong untuk pengolah dan pemasarannya kan program-program sudah ada yang didorong, nah ini lebih baik dijaga dan mungkin didorong secara program di 2021 untuk ditingkatkan kembali. Karena ternyata masih banyak masyarakat yang masih belum memahami program-program ini dan membutuhkan pada dasarnya program-program tersebut.

Nah kemudian juga masukan dari kemarin di wilayah, mungkin Pak Menteri paham juga wilayah Musi Banyuasin terkait mereka mempertanyakan pakan Pak, pabrik pakan. Karena disitu kan wilayah perairan juga berdampingan Pak. Mungkin kami tidak punya laut di Sumatera Selatan tapi sungainya besar-besar. Jadi penting juga mungkin untuk kita garisbawahi masalah ini.

Nah kemudian saya ingin mempertanyakan terkait ... di Musi Rawas Bapak-Bapak. Karena saya butuh penjelasan juga, sudah sejauhmana perkembangan fisik dan administrasinya. Karena saya kesana juga belum mendapatkan jawaban yang pasti dan bahkan saya bertemu dengan Forkopimda disitu sudah 6 tahun berjalan tetapi karena anggarannya kalau saya, Karena ini kan yang lalu Pak ya, Anggarannya kan lumayan besar. Jadi jangan sampai nanti menjadi permasalahan juga didepannya untuk KKP. Nah jadi tolong dievaluasi. Karena begini, saya mendukung program ini Pak Menteri. Karena harapannya kedepan bisa melibatkan masyarakat sekitar dan bahkan PAD Kabupaten tersebut, itu efeknya besar. Tapi jangan sampai juga diabaikan. Nah hal-hal ini yang memang penting kita dorong.

Nah kemudian ada juga masukan terkait masalah ikan hias. Bahwa ada hal-hal yang mungkin harus secara spesifik dicermati terkait potensi ikan hias di semua wilayah. Saya yakin disetiap wilayah memiliki potensi tersebut, karena ini juga yang bisa membantu, tadi Pak Menteri menyatakan bahwa ikan adalah sektor yang mungkin bisa dijadikan sektor terdepan pasca pandemi ini, betul tapi bukan hanya ikan untuk dikonsumsi tetapi juga hal tersebut.

Nah kemudian terakhir Pak Budi dan Pak Sudin, Saya juga Program gemar ikan dan bulan bakti karantina kemarin saya ucapkan terima kasih karena itu cukup membantu masyarakat yang terdampak. Dan sedikit informasi di wilayah-wilayah saya yakin bukan hanya wilayah Timur tapi

Indonesia bagian Barat yang terdampak ada *over stock* ikan yang mungkin harus dibantu juga solusinya seperti apa dari KKP, contoh di Oku Timur mungkin Pak Menteri sudah mendengar ada 60 ton *over stock* ikan patin, dan bahkan lele pun bisa *over stock* Pak. Yang biasa ini agak cepat perputarannya tapi hari ini terkendala. Nah ini yang paling penting kita sampaikan agar menjadi catatan KKP. Pada dasarnya kembali saya ingatkan Komisi IV mendorong untuk ada peningkatan anggaran, akan tetapi karena saya lihat Pak di halaman 13 program prioritas KKP Tahun 2021 ada disitu. Saya takutnya saya tafsir, pasar ikan bertaraf internasional ini kalau memang yang hal-hal seperti ini menjadi bahan koreksi kita bersama dulu Pak, apakah sama seperti yang seperti-seperti sebelumnya. Karena banyak yang sebelum-sebelumnya juga tidak tuntas. Jadi saya harap kita lebih baik mendorong kepada program pemberdayaan masyarakat nelayan.

Demikian dari saya.

*Wabillauhitaufiq Walhidayah,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Riezky.

Berikutnya Pak Ibnu Multazam. Kami persilakan Pak.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan yang saya hormati,
Bapak-Bapak dan Ibu sekalian Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Pak Menteri beserta segenap jajaran yang saya hormati.

Saya hanya menggarisbawahi dari 3 Anggota yang telah menyampaikan. Yang pertama dari Pak Andi Akmal Pasluddin, kaitannya dengan PNBPN. PNBPN itu saya kira merupakan kinerja juga dari Kementerian, bukan hanya masalah serapan anggaran. Untuk itu saya setuju kalau PNBPN itu menjadi bagian dari bahan rapat yang disampaikan kepada Komisi IV DPR RI. Setiap laporan evaluasi Tahun seterusnya, tapi kalau ini evaluasi Tahun 2019 itu untuk PNBPN.

Yang kedua, menggarisbawahi dari Pak Ono. Saya kira bukan hanya Pangandaran Pak Ono, Mia Marinanya bukan hanya Pangandaran tetapi juga Mia Marine Morotai Aquarium. Morotai juga sama masalahnya. Karena didalam RKAKL 2021 ini belum tampak. Sehingga ini perlu menjadi perhatian.

Yang kedua dari Mba Kiki, dia menyebut gemar ikan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Di dalam Tahun 2021 hendaknya ditambah kegiatannya termasuk bioflog. Kalau perlu jangan hanya 300 atau 200 lebihlah, kalau perlu 500 atau 1000 bioflog. Karena ini meningkatkan sekali

produk ikan budidaya, baik lele, gurame dan lain sebagainya. Yang selanjutnya keluar dari 2019 ini saya ingin mendapatkan penjelasan tentang masalah jaring apung di Pangandaran yang hanyut. Yang kira-kira sudah menjadi masalah di Direktur Perinusnya, apakah ini sudah selesai di dalam menyelesaikan audit BPK.

Yang terakhir masalah pengawasan. Kalau kita hitung-hitung rencana Tahun Anggaran 2021 baik kapal maupun *surveillance*, *airbond* itu 224 hari. Jadi kapal layarnya itu pengawasannya 122 hari, *airbond surveillance*-nya itu 122 hari berarti jumlahnya 224 hari. Kalau dihitung dalam 1 tahun ini kan kurang banget. Nah biasanya pada akhir tahun Desember ini ruang pengawasan itu relative kosong karena pergantian tahun anggaran dan semua Kementerian/Lembaga itu juga sudah habis anggarannya untuk melakukan pengawasan. Pencurian ikan juga dilakukan pada pergantian tahun anggaran, mereka tahu kelemahan kita. Mereka masuk. Untuk itu Tahun Anggaran'20 ini mohon penyerapan anggarannya diawet-awetkan sampai akhir Desember. Jangan sampai akhir tutup tahun anggaran ini sudah habis, kira-kira begitulah. Nah untuk itu mohon direncanakan dengan baik, dan kalau perlu anggaran 2021 ini hari layarlah ditambah kalau memang ada tambahan anggaran.

Terima kasih Pak Ketua.

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Ibnu terima kasih.

Selanjutnya Pak Sulaeman Hamzah.

Kami persilakan Pak Sulaeman.

F-NasDem (H. SULAEMAN L HAMZAH):

Baik.

Terima kasih Pimpinan.

Kawan-kawan Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Pak Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati.

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pertama masih dalam suasana Bulan Syawal. Saya juga mau mengucapkan "Selamat Idul Fitri" walaupun sudah lewat. Mohon maaf lahir bathin, *minal aidzin wal faidzin* untuk kita semua.

Yang berikut saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteri dengan dilaksanakannya bulan mutu karantina kemarin. ini nampaknya baru pertama kali mungkin kita melaksanakannya dengan cara

khusus karena adanya pandemi COVID-19. Memang ini diharapkan kalau bisa setiap tahun pada saat bulan mutu karantina itu sedapat mungkin bisa dilaksanakan hal semacam ini, sehingga manfaat seperti yang kita rasakan sekarang dengan adanya COVID ini memang luar biasa apresiasi dari masyarakat sekaligus menjadi paket gemar ikan yang memang sudah disampaikan dari program Kementerian Kelautan Perikanan.

Yang kedua saya juga menyampaikan apresiasi juga kepada Pak Menteri dan jajaran yang kemarin dengan pemeriksaan di lingkup KKP dimuat dalam IHPS BPK Semester II Tahun 2019. Ini tidak ada temuan. Ini merupakan sebuah prestasi yang tadi sudah disampaikan Pak Menteri juga, realisasi anggarannya mencapai 91,73%.

Berikut tentang Rencana Kerja dan Anggaran KKP Tahun 2021. Pak Menteri, beberapa hal mau saya sampaikan. Pertama soal rencana bantuan kapal 5GT sampai 10GT yang memang sudah diprogramkan. Wilayah Timur ini Maluku-Papua ini memang sangat membutuhkan kapal-kapal kecil semacam ini, dan NTT juga maaf. NTT, Maluku dan Papua ini sangat membutuhkan kapal kecil semacam ini. Sehingga barangkali anggaran tahun berikutnya ini bisa ditambah unitnya sehingga pelayanan kita kepada masyarakat daerah pesisir ini bisa lebih maksimal. Kita bicara tentang kesejahteraan masyarakat tapi yang kita perhatikan lebih kepada nelayan-nelayan besar. Sementara di Dapil saya dan mungkin juga di Maluku juga sama NTT.

Di tempat saya Pak Menteri ini nelayan lokal. Kalau masyarakat lokal Papua dikenal dengan vocal bicara soal politik sebagaimana kita semua tahu. Tetapi untuk kesejahteraan tidak banyak orang yang bicara. Nelayan local ini disana hampir tidak terdengar suaranya. Tapi ketika saya kunjungan kelapangan Pak Menteri, itu dari tahun kemarin sebetulnya saya juga sempat sampaikan itu masyarakat lokal yang tinggal di pesisir Sungai, di teluk-teluk ini mereka hanya bisa menangkap ikan dengan jaring tanpa perahu ataupun kalau dengan perahu mereka dengan dayung saja sehingga ini tangkapan mereka praktis hanya untuk makan sehari-hari. Dan itulah sampai sekarang mereka bertahan dengan kehidupan mereka dengan cara itu.

Saya ingin mengusulkan Pak Menteri sebisa mungkin nelayan yang terakhir saya sebutkan tadi yang kurang beruntung ini kita fasilitasi mereka dengan ketinting. Ketinting ini kan tidak mahal juga harganya. Mungkin itu diperbanyak sehingga semua kampung kita bisa fasilitasi mereka dan dengan demikian maka ekonomi didesa-desa, di kampung-kampung ini bisa terlayani dengan baik.

Masih di Merauke juga Pak Menteri, ini ada ikan yang memang terbuang percuma hanya diambil gelembungnya. Karena gelembung ikan ini dikenal sangat mahal. Gelembungnya diambil, ikannya dibuang. Itu berton-ton. Ada usaha nelayan yang menyelamatkan itu tapi tidak seberapa kuat untuk bisa menampung. Barangkali ada cara untuk kita bisa memulai melihat didaerah Wanam khususnya Pak Zulfikar ya. Daerah sana memang terkenal ikannya melimpah. Tapi keadaan sampai sekarang semacam itu.

Kemudian saya juga mau sampaikan beberapa hal terkait dengan Pelabuhan Ikan di Depapre.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Sulaeman bisa agak cepat sedikit Pak waktunya Pak.

F-NasDem (H. SULAEMAN L HAMZAH):

Baik.

Terima kasih Pak Ketua.

Pelabuhan ikan di Kabupaten Jayapura ini pelabuhannya itu sampai sekarang belum berfungsi baik walaupun kemarin ada penyerahan beberapa drum minyak untuk beberapa kepada masyarakat tapi masih jauh dari harapan. Saya kunjungan kesana kemudian disana ada fasilitas memang tapi belum sempurna. Anggaran juga kabarnya ini dari Pusat juga, kemudian Provinsi dan juga Kabupaten tapi tidak selesai juga. Jalan masuknya pun susah, di Kabupaten Jayapura Bang. Dapapre namanya. Ini kalau bisa diusahakan karena PON yang tertunda ini juga ada baiknya mungkin. Kalau memang masih bisa dikejar ini difungsikan untuk bisa melayani masyarakat nelayan sekaligus melayani PON nanti.

Yang terakhir, selanjutnya saya sampaikan untuk budidaya. Budidaya ikan Danau Sentani yang berkali-kali saya sampaikan. Ini juga persiapan PON nantinya, bisa dimaksimalkan. Dan ada 1 jenis udang, Pak Menteri mungkin tahu, kawan-kawan. Di Wamena itu ada udang namanya udang selingkuh. Udang selingkuh ini bentuknya begini Pak Ketua. Udang tapi tangannya kepiting, ini enak memang, Tapi karena ini masih...

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Sulaeman.

F-NasDem (H. SULAEMAN L HAMZAH):

Sebentar lagi Pak.

Jadi kalau bisa ini ada budidaya karena makin hari makin berkurang makin langka.

Terima kasih Pak Ketua.

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Bapak/Ibu,

Tadi Pak Menteri minta ijin 2 menit karena tidak bisa diwakilkan. Kita stop dulu 2 menit, maju kembali.

Silakan. Karena ini tidak bisa diwakilkan katanya.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Irjen, dan Pak Dirjen PSDKIP harus ke Mahkamah Agung untuk Masalah Hakim Ad Hoc untuk di KKP Pak.

Dijinkan tidak Pak Ketua?

KETUA RAPAT:

Mana yang lebih penting, Raker atau disana?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Disana sudah panel Cuma hari ini Pak Ketua tidak bisa digeser. Saya yang mewakili Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Oke.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Ini penting sekali, tapi disana tidak bisa digeser-geser Pak. Tapi kembali ke Ketua.

KETUA RAPAT:

Oke silakan kalau itu lebih penting. Seharusnya jadwalnya KKP ini seingat saya bukan hari Selasa loh, hari Rabu, Kok tiba-tiba bisa berubah. Awal diputuskannya itu Selasa itu Kehutanan, bukannya hari ini, ini.

Ya silakan kalau disana lebih penting. Kita lanjutkan pertanyaan Anggota.

KETUA RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Ansy Lema silakan Pak.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Salam sejahtera buat kita semua.

Pimpinan dan Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama saya ingin memberikan apresiasi sekaligus terima kasih Pak. 2 program gemar ikan dan juga kerjasama dengan BKIPM itu betul-betul bagus, membantu nelayan, KKP bertindak sebagai off taker dan kemudian menyalurkan bantuan itu konkrit kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan itu adalah hasil kerjasama dengan Komisi IV. Secara pribadi saya memberikan apresiasi Pak. Dan nelayan di NTT terutama di Kota Kupang dan beberapa tempat lainnya itu menyampaikan terima kasih Pak karena ikan mereka akhirnya dibeli oleh KKP.

Yang kedua soal SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) yang ada di Rotendao dan Sumba Timur Pak. Itu sudah kemarin disepakati dan kita ingin tahu progressnya kira-kira seperti apa Pak. Karena nelayan di Rotendao dan juga nelayan rumput laut di Sumba Timur ini ingin segera langsung ada aksi konkrit Pak dalam bentuk dukungan, bantuan dan lain sebagainya Pak terutama di saat pandemi ini. Itu 2 apresiasi yang harus saya sampaikan.

Yang berikut kritisi Pak. Soal ekspor benih lobster. Ada Peraturan Menteri KP Nomor 12 Tahun 2020 intinya kran ekspor benih lobster ini dibuka lagi. Pak Menteri menjelaskan tadi saya simpulkan kran ini dibuka karena alasan paradigma pandemi. Pertanyaan saya, sampai kapan benih lobster ini akan terus diekspor? Kalau alasannya paradigma pandemi. Yang kedua, apa betul yang mau ditolong ini adalah nelayan-nelayan tradisional, nelayan kecil. Kalau berdasarkan penjelasan Pak Ono Surono saya garis bawah, sebenarnya ada kepentingan korporasi dibalik ini Pak.

Yang berikut ada pemberlakuan persyaratan 2% yang harus dilepaskan dilaut. Apa cukup 2% Pak? kalau untuk kepentingan keberlanjutan dan kelangsungan hidup lobster kita. Mengapa misalnya tidak 10% Pak. Jujur saya tidak melihat ada niat KKP kalau bicara soal 2% yang dilepaskan di laut ini Pak terkait dengan upaya pelestarian dan budidaya Pak. Nah kalau kita lihat saat pandemi ini terjadi banyak negara eksportir di dunia, eksportir pertanian, peternakan dan lain-lain, itu mengembangkan sebuah kebijakan politik Autarki Pak. Orientasinya mereka seok eok, orientasinya kepada paradigma diolah didalam negeri Pak. Kalau bicara soal lobster saya tahu betul kita punya benih, kita kaya benih, kita juga punya pakan, tetapi teknologi dan sumber daya manusia kita lemah Pak.

Saya ingin tanya, apa desain kebijakan strategis KKP dalam hal teknologi ini dan kemudian peningkatan kompetensi peningkatan sumber daya manusia Pak. Saya khawatir dalam jangka panjang kita akan beralih menjadi importir lobster kalau seandainya kita tidak bereskan, tidak fokus pada aspek budidaya lobster ini Pak. Karena itu menurut saya kran ekspor ini, ini agenda jangka pendek Pak, bukan jangka menengah atau jangka panjang.

Yang berikut soal cantrang Pak. Soal cantrang, saya ingin tanya ini dampak positif buat nelayan kecil dan tradisional ini apa Pak? Yang kedua, dampak ekologis terutama terhadap ekosistem dan habitat laut ini bagaimana Pak? Siapa yang mendapatkan manfaat besar dari ijin cantrang ini. Apakah ada alasan teknokratis dibaliknya, dan lagi-lagi saya menggarisbawahi

penjelasan Kang Ono tadi soal kajian akademis yang komprehensif Pak. Saya juga tidak mau berprasangka buruk tetapi sejauhmana pengawasan Pak bahwa kapal yang ukurannya besar 200GT itu tidak kemudian mengakibatkan nelayan tradisional dan nelayan kecil itu kemudian tidak akan dapat apa-apa Pak. Karena fishing groundnya disekitar pantai dan teluk itu kemudian akan kekosongan ikan Pak. Saya kira point penting kalau Bapak bicara soal zonasi tadi, maka yang harus diperkuat itu adalah aspek pengawasannya Pak walaupun saya sendiri masih skeptis. Dengan zonasi ini pun dampak ekologis itu tidak berbahaya Pak.

Yang berikut soal beberapa kerjasama KKP dengan Komisi IV terutama di Direktorat Jenderal Budidaya Perikanan Pak. Nah itu ada beberapa program Pak, kita sudah pernah bicara disini soal verifikasinya. Tetapi terakhir itu belum bisa dilanjutkan karena yang diminta itu harus diverifikasi pakai akta notaris Pak. Saya ingat betul Rapat Kerja bersama Pak Menteri Edhy Prabowo waktu itu Bapak katakan, it's oke tidak masalah begitu. Nah ini yang melakukan verifikasi ini kalau tidak salah di NTT ini dari Mandi Angin Pak. Nah mohon Pak kalau bisa tidak usahlah pakai akte notaris itu Pak. Saya saja jaminannya sudah cukup Pak, karena ini kita mau bantu masyarakat mereka buat akte notaris, lah ini tidak punya uang Pak. Dan Kementerian lain, Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun mereka bahkan bisa melakukan verifikasi jarak jauh Pak. Dunia juga sudah dalam genggaman ini. Zoom meeting bisa kita lakukan.

Yang terakhir Pak soal Desa Wisata Bahari Pak. Desa Wisata Bahari ini potensinya besar tapi ini kantong kemiskinan Pak. Di NTT ada beberapa tempat, salah satunya di Alor indah sekali Pak. Mohon dukungan Pak. Kemarin saya sempat melakukan diskusi dengan (saya lupa) Direktur di KKP Pak. Pak Huda ya. Terima kasih banyak. Kami melihat bahwa KKP betul sungguh mendorong soal ini. Kita berharap pengembangna Desa Wisata Bahari ini bisa menggeliatkan ekonomi masyarakat dan kemudian bisa melakukan sejalan dengan konservasi dan pelestarian ekologis.

Saya kira ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan Pak, tetapi saya happy bekerjasama dengan KKP Pak. Karena memang nelayan dan masyarakat langsung merasakan hal itu. Nah kedepan ini mungkin dikembangkan lagi Pak.

Sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ansy.

Berikutnya Pak Darori.
Siap-siap Bu Luluk.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Ketua, Pak Menteri, Pak Dirjen yang kami hormati,

Jadi ada 3 hal yang kami ingin berikan masukan Pak. Pertama, apresiasi hasil laporan BPK tapi saya juga terkejut Pak. Terkejutnya apa? Mungkin teman-teman yang baru bergabung di Komisi IV bahwa KKP periode ini. 2019 kan periode yang lalu juga. 2016 itu *disclaimer*, 2017 juga *disclaimer*. Artinya apa? *disclaimer* itu uang dan fisik tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tahun 2018 dipertanyakan, kok 2019 bersih. Itu apa karena Sekjennya Polisi Pak?, Ini bagus, kalau memang ini contoh kita akan merekomendasikan karena Beliau penyidik, Bintang 2, saya kira bagus ini. Mendidik pada kita untuk kerja baik-baik, karena Dirjenya kan masih yang lama Pak. Ini bagus ini. Jadi saya akan menyampaikan ini Pimpinannya.

Yang saya pertanyakan Pak, yang *disclaimer* ini sudah ditindaklanjuti atau belum? Jangan malah ini ditutupi, karena yang bertanggungjawab ini Pimpinan tertinggi yaitu Menteri. Pengalaman Kabinet yang lalu Menterinya hanya, Presiden saja tidak diperiksa, Wapres saja diperiksa. Ini tolong, karena kita sebagai saksi nanti ya, yang sudah duduk 5 tahun yang lalu kemungkinan jadi saksi. Kenapa dulu disahkan anggarannya, dan sebagainya itu. Ini Pak Menteri tolong dicek jangan dibiarkan karena mungkin ganti-ganti tahu-tahu ini sudah diranah hukum. Karena BPK itu kan 2-3 bulan tidak ada tanggapan ditindaklanjuti penegak hukum ini. Ini saya ingatkan.

Terus yang kedua Pak Menteri, tadi ada usulan tambahan anggaran. Saya kira sangat setuju tapi tolong dibuat secara tertulis Pak Menteri usulannya. Saya baru buka data BPS ternyata betul Pak. Nelayan kita itu ada 6,5 juta hektar ini menurut BPS. 2,5 juta itu nelayan, yang 4 juta budidaya. Itu 86% itu nelayan kecil. Jadi kalau anggaran yang diajukan yang baru mohon prioritaskan untuk nelayan kecil Pak. Saya yakin kalau seperti ini kepada Pemerintah, DPR akan mendukung penuh itu. Karena pengalaman ini Pak, saya juga kaget ya. Baru-baru ini dengan UPT-nya Pak Syarif kami belum lama kumpul nelayan di Kebumen Pak, 200 orang. Itu nelayannya tidak bisa baca GPS Pak. Itu sengaja semua nelayan dari Pangandaran semua yang ambil ikan. Pantai Kebumen terpanjang ini. Nah ini kita akan sepakat dengan Pak Syarif. Kita akan memberi, karena nelayan kita ini perlu teknologi, dukungan peralatan dan dana itu.

Nah yang terakhir Pak Menteri, kami bertiga disini salah satu Anggota Panja Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam waktu dekat ini akan membahas Undang-Undang yang terkait dengan KKP Pak. Di KKP ada 4 Undang-Undang yang diusulkan oleh Pemerintah dirombak. Dan ini sangat dahsyat perombakannya, contohnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau Kecil. Dari 80 Pasal itu yang dirombak itu 32 pasal ditambah Pasal baru 11, jadi hampir semuanya Pak. Nah kalau Kehutanan sudah *expose* ya jadi ada modal kita untuk bicara di Panjalah gitu. Dan juga teman-teman yang disini tidak terwakili bisa menyampaikan pada temannya yang di Panja gitu Pak.

Jadi mohon kiranya melalui Pak Menteri segera *expose* di kita karena yang lain sudah. Sehingga kita ada masukan bahan untuk bicara Panja

disana Pak Menteri. Jangan sampai. Saya tanyakan ini, ini undangan revisi ini apa dari Kementerian atau orang lain yang bikin. Undang-Undang ini akan baik Pak. Itu harus memenuhi syarat 5. Pertimbangan Politik, ekonomi, lingkungan, hukum, dan kerakyatan. Yang sudah dibahas sekarang ini rata-rata hanya politik dan ekonomi menekan rakyat Pak, contoh yang di kehutanan yang dahsyat, pelanggaran 2 kebun yang jutaan hektar. Yang pelanggaran dari temuan kami itu hampir Rp400 Triliun akan diputihkan karena sudah diduduki. Itu rakyat mau kemana, mestinya itu dicabut kasihkan ke rakyat, ini contohlah salah satu. Jadi saya kira ini ada 4 Undang-Undang, Undang-Undang 27, 32, 45, dan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petambak Garam Pak. Ini tolong teman-teman Eselon I ini segera. Jangan sampai kami blank tidak punya modal untuk bicara di Panja. Karena kami juga mengundang FGD dengan para narasumber. Salah satu mantan Menteri Pak Rohmin itu kita undang, apa pendapatnya dengan pasal ini, dan banyak yang tidak setuju. Karena ini merugikan nelayan ini kecil.

Saya kira demikian Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Darori.

Saya rasa ini penting Pak ya. Jadi kalau bisa teman-teman Eselon I nanti kita, bukan hanya teman-teman di Baleg tapi ke Komisi IV. Kita ini yang adai di Baleg untuk Cipta Kerja ini benar-benar kita ini blank, apa terkait revisi-revisi yang sekarang diajukan Pak Darori. Jadi kami mohon Komisi IV kalau bisa segera Pak diberikan panduan bahannya.

Terima kasih Pak Darori.

Berikutnya Bu Luluk. Siap-siap Pak Suhardi Duka.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Baik Pimpinan.

Pak Menteri yang saya hormati, dan semua jajaran,
Bapak/Ibu sekalian yang berbahagia.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama masih menyambung masih menyambung Pak Darori. Ini kebetulan titipan teman-teman dari para pegiat dan aktivis yang terkait dengan isu kelautan perikanan Bapak. Jadi kemarin kebetulan saya juga sama Pak Dirjen, dan hasilnya juga disampaikan ke saya. Intinya ada kegelisahan dan kekhawatiran yang sangat dari teman-teman semuanya terutama masyarakat sipil ini kalau misalnya KKP tidak memiliki komitmen yang sangat kuat terkait dengan sustainability Pak karena RUU Cipta Kerja ini sedang dibicarakan dan kita belum tahu standing positionnya dari Kementerian KKP ini seperti apa karena banyak

sekali pasal-pasal baru yang ini melibas dan itu terkait dengan Undang-Undang kita yang sebelumnya ada, dan ini akan sangat mengancam terutama masyarakat Pesisir, pulau-pulau kecil, nelayan-nelayan kecil, dan seterusnya. Pasti di KKP sudah punya kajian mungkin, tetapi kalau memang ada atau belum ada tolong dibagilah kepada kami sehingga kita kalau ditanya orang tahu seperti apa sikapnya KKP. Sementara ini saya baru bisa mengatakan bahwa ini adalah sikap saya secara pribadi yang tentu akan bersama dengan mereka untuk memperjuangkan agar isu keberlanjutan ini masih tetap menjadi *concern* kita semua.

Yang kedua Bapak Menteri, juga ada kekhawatiran yang sangat kalau misalnya pasal-pasal atau yang terkait dengan konsesi kepada kapal asing di wilayah ZEE ini nantinya dibuka karena memang ternyata RUU kita ini membuka kesempatan itu maka ini akan sangat berbahaya kepada terutama stok kita Pak. Jadi ada pengalaman di negara-negara Pasifik sebenarnya ketika mereka memberikan konsesi terutama kepada China, mereka itu ya terkeruk habis gitu Pak. Akhirnya nelayan-nelayan yang lokal yang tradisional atau nelayan yang kita merah-putih itu yang pasti kemudian akan kegosur karena tidak mampu bisa bersaing dengan korporat yang sangat besar yang ukuran kapalnya saja sudah sangat fantastis itu. Nah ini lagi-lagi diminta untuk Menteri KKP untuk bisa *secure* agar kemungkinan kalau misalnya ini harus dibuka ini bisa kita pertahankan untuk kita jaga dan kita bilang tidak. Karena memang Presiden kita sejak dari awal sudah mengatakan bahwa investasi yang dimunculkan didalam RUU ini. Nah yang kita khawatir sektor kelautan ini pasti mau tidak mau akan kena imbasnya, Pak Dirjen juga.

Nah kemudian, saya tadi lihat laporan terkait dengan garam Pak. Saya di beberapa kali pertemuan dengan Bapak juga meminta dan sebenarnya juga mendorong apa sih yang membuat kita ini tidak mampu memenuhi kebutuhan garam industri. Karena ini kan impornya luar biasa, Apakah ini memang sudah kontrak mati ini dengan perusahaan-perusahaan importir sehingga sebenarnya kita punya kemampuan didalam negeri untuk bisa memproduksi ini. Toh dulu katanya sudah ada temuan, kalau tidak salah BPPT atau apa yang bisa menghasilkan kualitas garam ini setara dengan kebutuhan yang dibutuhkan untuk garam industri. Tapi kenapa kemudian ini di *follow up*. Nah ini yang kita butuhkan, apa? *Political Wheel*, kemauan kita untuk mau apa tidak. Kalau kita mau pasti tidak akan terjadi importasi yang sangat besar terhadap garam industri ini. Sementara stok garam yang tidak industri itu sudah melebihi dan harganya selalu jatuh. Saya sih tidak punya garam Pak di Dapil, tetapi ini untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan para nelayan-nelayan kita, petani garam kita, maka ini harus kita suarakan. Jadi *beyonce* Dapil seperti yang suka dikehendaki sama Pak Sudin ini.

Nah yang berikutnya saya lagi-lagi nuwun sewu Pak. Ini nasibnya para nelayan kerambah saya ini tidak pernah disebutkan disini. Tidak harus spesifik tentang Dapil saya, tetapi bagaimana bentuk dukungan dari Pemerintah kepada mereka. Disaat COVID seperti ini mereka ini rata-rata juga kehilangan mata pencaharian harian Pak. Jadi bukan hanya nelayan tangkap, atau budidaya yang lain ya tetapi mereka pun tidak bisa mengeluarkan budidaya mereka karena memang serapannya tidak ada. Rata-

rata misalnya per hari itu 15 ton untuk ikan nila, tetapi hari ini hanya maksimal itu 2 ton. Nah kondisi ikan mereka itu sekarang gemuk-gemuk Pak.

Jadi kalau ikan gemuk itu tidak bisa diserap oleh pasar karena memang kebutuhan pasar, restoran atau apa itu hanya ukuran tertentu. Nah kalau sudah kayak gini bagaimana, sementara 70% dari produksi itu harus dari pakan. Pakannya saja impor. Nah ini nanti juga terkait lagi dengan dukungan saya, bagaimana caranya agar kita sudah waktunya bisa swasembada pangan ini. Ayolah kita stop yang namanya pakan ini harus impor. Masa kita tidak punya misalkan lembaga riset atau Litbangnya yang ada di KKP yang memungkinkan ada substitusi yang kualitasnya lebih kurang sama, pasti bisa. Setelah kita cek misalnya bahan-bahan atau komponen yang harus ada pada pakan itu, kita punya kok Pak. Nah ini lagi-lagi hanya soal mau apa tidak. Jadi saya harapkan kita punya kemauan yang sama ya Pak Menteri ya. Karena saya sangat bahagia sekali dengan kinerjanya Pak Menteri, yang tadi dibilang tidak ada temuan dan seterusnya, serapannya juga sudah luar biasa bagusnya dibandingkan dengan periode yang sebelumnya. Nah ini hanya tinggal tadi yang saya sampaikan soal kemauan politik kita dan dukungan agar semua sektor ini bisa mendapatkan perhatian yang sama.

Terus kemudian yang terakhir, kebetulan 3 bulan ini saya praktis ada di Dapil tetapi kluyuran saya ini dengan segala resikonya memang itu hampir perjalanan saya di Jawa Tengah kita coba sebarkan juga semangat kepada milenial Bapak untuk bisa mencoba melirik usaha atau bisnis yang Bapak Menteri pernah bilang termasuk pertambakan dan seterusnya. Jadi meskipun saya juga tidak punya tambak, tetapi saya coba bilang ke teman-teman muda di Cilacap, di Pemalang, bahkan di Banyumas dan seterusnya, mereka semuanya tertarik tapi memang bagaimana ya cara aksesnya itu. Apakah ada pelatihan.

Tadi saya suka sekali ketika ada gagasan, jadi pelatihan, pendampingan, termasuk akses ke BLU mungkin. Karena nuwun sewu Pak Menteri, dibawah itu ternyata tidak seindah apa yang kita bayangkan. Saya punya nelayan kerambah yang itu katakanlah Guremlah. Ternyata untuk akses BLU saja itu mereka itu harus menyediakan agunan kayak STNK motor atau apa. Saya bilang sama mereka, ini gila apa ya. Untuk beli motor saja mereka harus motor bodong. Mana ada itu ada BPKB. Kalau perlu mana ada itu STNK karena hanya dipakai untuk mobilitas disekitarnya. Tapi itu saja yang kemudian dijadikan syarat agunan padahal nilai pinjamannya saja itu tidak sampai 5 Juta. Nah yang kayak gini ini bagaimana cara kita menertibkan sehingga apa yang kita inginkan itu nyambung sampai kepada bawah. Jadi tolong nanti Bapak Menteri benar-benar bisa memastikan kepada mitranya yang terkait dengan akses pembiayaan ini. Jangan dipersulit kalau sudah urusan sama nelayan kecil, sama usaha kecil, dan sebaliknya jangan terlalu mudah kalau kepada pengusaha-pengusaha besar.

Saya kira itu Bapak. Mohon maaf jika saya harus pamit ada kunjungan dari Bapak Menteri Pertanian di sekolahan kami di Ciganjur.

Terima kasih.

Pak Menteri selalu sukses,

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Suhardi Duka silakan.

Siap-siap Bu Alien Mus.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pak Menteri bersama seluruh jajarannya.

Terima kasih karena Pak Menteri sudah berkunjung ke Dapil saya di Sulawesi Barat dan masyarakat disana sangat antusias menyambut Bapak. Bahkan akibat kunjungan Bapak ke Pulau Balabalakan akhirnya Pulau itu mahal terjualnya. Kita ketahui bahwa memang kita menghadapi COVID dan masih dalam rangka pemulihan. Untuk anggaran 2021 COVID itu dianggarkan Rp905 Triliun. Besar sekali. Bahkan dalam pemulihan kebijakan, pemulihan ekonomi sayangnya Pemerintah tidak menjadikan seKtor perikanan dan pertanian menjadi salah satu prioritas. Yang lebih prioritas adalah Perbankan, bahkan BUMN. Dana talangan BUMN itu kurang lebih Rp87 Triliun. Ini adalah sangat disayangkan.

Olehnya itu memang kita perlu bantu Pak Menteri untuk menyakinkan Pemerintah, untuk bisa melihat bahwa ini adalah prioritas. Ini adalah sektor yang memicu pertumbuhan ekonomi. Yang saat ini kita tahu bahwa kemungkinan kita minus sampai dengan 3% pada Tahun 2020 kalau COVID ini tidak diselesaikan dengan baik. Saya mengapresiasi karena capaian 91% sudah berjalan, kemudian juga bantuan dari hari karantina dan bantuan perikanan sudah sampai ke masyarakat dengan baik bersama dengan DPR RI tentunya. Saya menyampaikan atau menanggapi beberapa isu-isu penting, yang pertama adalah kebijakan tentang penggunaan cantrang. Kita mengetahui bahwa kelas nelayan kita ini berbeda-beda, ada kelas menengah ke atas dan inilah yang banyak dimiliki oleh pemilik cantrang. Olehnya itu, saya tidak perpanjang. Saya setuju saja, yang penting berada di zona ZEE. Tidak berada didalam zona ekonomi kita kaerna ini adalah bagian daripada nelayan kecil. Kalau sampai yang 10% ini menguasai nelayan kecil, saya kira tidak terjadi keadilan pada nelayan kita.

Yang kedua terhadap lobster, baby lobster kita ekspor. Memang kita butuh ekspor sekarang. Kita butuh devisa, kita butuh Dollar. Hanya memang mungkin teman-teman menanggapi dari hasil lingkungan hidup tapi saya

melihat bahwa baby lobster ini memang perlu di support daripada dimanfaatkan hanya segelintir orang. Yang penting BNPP-nya yang harus tetap terjaga dengan baik menjadi pendapatan negara.

Yang terakhir adalah menanggapi rancangan yang disampaikan oleh 2021 walaupun kita tidak akan menanggapi secara mendalam. Hanya saya meminta kepada beberapa Dirjen, walaupun kecil anggaran ini karena hanya Rp5 Triliun. Kami mungkin di Komisi IV DPR RI perlu teman-teman di Badan Anggaran ini kita rapat khusus untuk mensupport Kementerian KKP ini untuk bisa menambah sampai dengan Rp3-4 Triliun. Saya melihat bahwa pengadaan unit kapal Pak Perikanan Tangkap, saya kira ini hanya 20 unit. Saya minta jadi prioritas ini. Kemudian juga kita akan dukung Pak Menteri untuk cetak tambak didaerah, saya kira juga perlu pengadaan eskavator. Supaya kita berikan dukungan yang kuat. Demikian juga pengelolaan ruang laut, lokasi dermaga apung hanya 5 lokasi. Saya minta Pak, didaerah saya sangat membutuhkan ini.

Dengan demikian saya menyampaikan terima kasih karena semuanya kita harus mensupport karena ini adalah kondisi yang memang kalau tidak kita menyakinkan Pemerintah terhadap kebutuhan dan urgensi daripada KKP ini. Saya kira hanya akan memprioritaskan hal-hal yang tidak penting. Utamanya dalam mengalokasikan anggaran yang 2021.

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Berikutnya Bu Alien Mus.

Siap-siap Pak Slamet Ariyadi.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Baik, terima kasih.

Wakil Ketua yang bukan bayangan yang dibelakang,

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya juga mau mengucapkan "Mohon Maaf Lahir dan Bathin" kepada Wakil Ketua dan juga segenap Anggota Komisi IV dan juga Bapak Menteri beserta jajarannya. Terima kasih sekali kemarin kita juga telah melakukan gemar makan ikan didaerah dan para nelayan juga sangat merasa berterima kasih karena ikan-ikan yang sudah dibeli dan juga sudah dibagikan kepada masyarakat, dan itu sangat berdampak positif sekali bagi kita didaerah. Tadi juga sudah sempat disinggung oleh Anggota Komisi IV sebelumnya di daerah Timur. Memang kita ada kendala dengan pengawasan. Memang ini saya sudah melihat ada kapal yang untuk dianggarkan di prioritas Tahun 2021 untuk pengawasan, tapi kita juga harus melihat batas luas wilayah seluruh Indonesia khususnya

juga kita di daerah Timur, Maluku, Maluku Utara dan juga Papua, dan juga NTT. Ini memang agak butuh prioritas pengawasan yang kita lihat juga perairan Maluku, Maluku Utara dan juga Papua itu berbatasan langsung dengan dengan negara-negara lain, dengan negara luar.

Dan saya mengucapkan apresiasi sekali bahwa hasil dari three semester II ini audit BPK Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan tanggapan yang luar biasa, dan semoga bisa mempertahankan kinerjanya lebih baik kedepan dan bisa mempertahankan itu. Karena kita melihat isu-isu strategis yang ada pada saat ini, kebetulan sekali pada saat ini memang kita di Komisi IV ini dipertanyakan terus tentang tanggapan Komisi IV soal benih lobster yang dilakukan ekspor.

Kemarin itu saya sempat dipertanyakan soal benih lobster yang diekspor itu kurang lebih kalau tidak salah itu 8 cm Pak Menteri. Itu memang saya dapat datanya dari para nelayan kecil. Dan juga tadi yang disampaikan bahwa Pak Menteri menyampaikan bahwa sudah adanya peraturan tentang ekspor dari benih lobster. Kita ketahui bersama PNBP itu memang sangat menjadi permasalahan setiap kali melakukan ekspor. Karena PMK tentang bea keluar dan PNBP ini ekspor BBL belum keluar. Harusnya ekspor BBL belum bisa dilakukan kalau seandainya itu belum ditentukan Pak. Selain itu penunjukkan perusahaan yang bisa ekspor juga bermasalah dengan KPPI, ini yang kita dapat di lapangan Pak dan laporan yang kita terima. Penunjukan pengusaha logistik untuk eksportasinya juga rawan kolusi. Maka dari itu mungkin dari KKP sendiri harus ada transparansi agar tidak menjadi *missed understanding* di publik juga.

Terus, PNBP 30% untuk Kementerian terkait ini juga kan kita harus melihat Pak. Kalau memang PNBP sudah ditetapkan berarti kita mengetahui berapa persennya yang didapat oleh Kementerian terkait.

Terus, tadi yang sudah disinggung oleh Pak Andi bahwa PNBP yang cukup besar 2000 per ekor, itu memang bukan Cuma ada di NTB saja tapi para pembudidaya lobster juga itu yang didaerah-daerah lain juga mengeluhkan hal tersebut. Dan juga memang ini menjadi suatu pertanyaan yang besar buat kita juga. Saya harap kedepan lagi kita Komisi IV dan juga KKP ini bisa sinergi dalam melakukan suatu informasi-informasi yang bisa kita sampaikan ke para nelayan kita. Saya di Provinsi Maluku Utara itu memang luas wilayahnya sangat luas dan juga memang kemarin ada permasalahan soal penangkapan dengan nelayan-nelayan dari Philipina. Terus juga adapun hasil ikan yang sudah ditangkap tapi tidak adanya penyimpanan cold storage juga ini sangat memberikan permasalahan bagi para nelayan kita. Saya sampaikan juga Pak Menteri, dari semua Kepala Daerah yang ada di Provinsi Maluku Utara berharap sekali atensi dan program dari penganggaran KKP ini bisa betul-betul meyentuh didaerah kami karena memang luas wilayahnya juga laut dan nelayan yang begitu banyak.

Dan Pak Menteri saya ingin sampaikan bahwa tadi sudah disampaikan Pak Abdullah itu soal ekor kuning. Ekor kuning memang menjadi masalah juga di Provinsi Maluku Utara. Memang ini harus betul-betul di atensi

permasalahannya Pak. Maluku dan Maluku Utara itu masalahnya hampir sama, beda-beda tipis. Tadi memang kita fokus dengan penambahan ikan. Tapi kita juga harus melihat potensi ikan laut kita yang betul-betul tidak perlu lagi melakukan tetapi kita mengolah dengan baik Pak, Ikan kaleng misalkan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.)

Mba Alien agak cepat sedikit karena saya harapkan pukul 13.00 pertanyaan yang hadir selesai, kita break 30 menit kemudian masuk lagi yang virtual. Agak cepat sedikit ya.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Siap.

Kalau Ketua sudah bilang agak cepat sedikit saya sudah selesai kayaknya. Karena kalau Ketua saya bilang agak cepat, kalau cepat belum berhenti, kalau agak cepat saya harus berhenti.

Baik. Saya sudah melihat paparan yang dari Kementerian KKP tapi memang betul harus ada dukungan penganggaran Pak. Komisi IV betul-betul mengharapkan itu dan ini memang sangat sedikit anggarannya. Melihat ikan dan pertanian juga itu merupakan hajat hidup orang banyak dan masalah perut. Jadi mohon Komisi IV juga harus betul-betul memperjuangkan yang ada di Banggar untuk menambah anggaran di KKP.

Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih.

Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Alien Mus.

Berikutnya Pak Slamet Ariyadi. Kami mohon posisinya seperti yang kemarin Pak, di depan.

Siap-siap Pak Effendi Sianipar.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Terima kasih Pimpinan Komisi IV dan Anggota yang kami hormati.

Bapak Menteri dan jajarannya yang kami hormati pula.

Yang pertama, saya sangat mengapresiasi atas capaian serapan anggaran yang sudah relative cukup baik pada Tahun 2019 yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Yang pertama saya ingin menyinggung terkait masalah penggaraman yang hari ini kita lihat bersama garam rakyat ini anjlok bukan karena corona, tentunya karena masalah impor dan serapan yang tidak maksimal. Menurut saya khususnya kepada Kementerian KKP perlu membantu adanya akselerasi percepatan peningkatan mutu kualitas garam dari petambak masyarakat agar dapat mampu memproduksi lebih banyak garam yang kualitasnya K1 yang menjadi kebutuhan industri agar usaha penggaraman menjadi lebih baik dan bergairah, bermutu, dan berdaya saing dan tidak lagi terlalu tergantung pada impor. Tentunya kita lihat ketika di LKA 2021 ini kita lihat ada 30 unit perbaikan garam rakyat dan akan dianggarkan 300 hektar integrasi penggaraman.

Yang kita harapkan disini, bukan hanya fokus kepada infrastrukturnya. Akan tetapi saya minta kepada Bapak Menteri dan jajarannya bagaimana inovasi, bagaimana regulasi kesiapannya di tahun 2021 ini rakyat khususnya petambak garam ini tidak menjerit lagi dengan adanya karang impor. Tentunya mulai detik ini perlu kiranya ditingkatkan komunikasi atau pun perlu kiranya diatur regulasi baik yang berkaitan dengan impor ataupun produksi, ataupun perlu kiranya dilakukan sinkronisasi regulasi dengan Kementerian Perdagangan atau pun dengan Kementerian Perindustrian. Ini penting. Kiranya menjadi atensi bersama bagaimana dengan adanya pandemi COVID ini tidak hanya hal yang berskala besar yang kita perhitungkan. Akan tetapi petambak garam hari ini yang penting menjadi atensi bersama bagi kita sebagai pejuang, sebagai pahlawan untuk para petambak garam.

Yang kedua, saya sepakat dengan ada apa yang disampaikan oleh Mbak Kiki tadi, ini di 2021 Bapak Menteri akan menyiapkan pasar ikan bertaraf internasional. Kalau boleh saya sarankan, jangan terlalu berpikir dengan skala besar tapi kita perlu mendorong kinerja kita baik regulasi yang pro terhadap rakyat kecil, rakyat bawah, nelayan dan petani, bagaimana bisa merasakan hadirnya rakyat. Karena kemarin kami Bapak Menteri kami harapkan juga hadir di Dapil kami Pulau Madura yang pulaunya juga cukup lumayan besar, lumayan banyak potensi perikanannya juga luar biasa. Kami kemarin sudah mendatangi Pulau Kaniyan, Pulau Sepeken, Pulau Seseil yang ini sumber perikanannya luar biasa Bapak Menteri.

Jadi kami harapkan baik dari sarana, prasarana untuk melaut mereka sarana untuk pasar mereka ini perlu untuk difasilitasi. Karena kami kemarin di Dermaga Desa Kalisangkah kami datang disana khususnya para nelayan menjadikannya itu di Badan Dermaga Pak Menteri. Ini butuh fasilitas pasar yang mungkin tidak butuh terlalu bertaraf internasional. Akan tetapi mampu menopang bagaimana perekonomian desa bisa hidup.

Yang ketiga, terkait masalah nelayan. Bapak Menteri, ini istilahnya di Kepulauan itu ada 2 musim, musim barat dan musim timur. Jadi dengan skala musim barat dan musim timur ini berjenjang selama 6 bulan. Jadi mereka panen, perikanannya panen hanya 6 bulan dan 6 bulannya mereka nganggur. Tentunya kami butuh hadirnya dari Kementerian bagaimana memikirkan para nelayan yang 6 bulan nganggur minimal hadir bagaimana memberikan suatu

pelatihan, mampu memberikan suatu pembinaan, mampu memberikan suatu hal yang bisa bersifat positif kepada para nelayan.

Tentunya yang keempat Bapak Menteri, disisi lain ini ada banyak aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat nelayan. Ini tulisan dari masyarakat Sepeken, Kepulauan Kaniyan. Disana membutuhkan beberapa unit UPT perikanan disetiap kepulauan. Ini untuk mampu menjadi tumpuan bagi masyarakat nelayan agar lebih mudah didalam memasarkannya.

Yang kelima dan ini yang terakhir Bapak Menteri, tentunya kami berharap baik di 2020 dan di 2021 ini Bapak Menteri mampu untuk memprioritaskan skala kebutuhan aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Madura baik berkaitan dengan masalah petambak garam, berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur nelayan atau pun lainnya. Tentunya harapan besar bagi kami bagaimana Bapak Menteri bisa hadir secara fisik untuk masyarakat Madura.

Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.

*Wauallahumafiq Ila Aqwamith Thoriq,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'allaikumsalam,

Luar biasa. Terima kasih Pak Slamet.

Yang terakhir untuk pertanyaan yang hadir fisik, Pak Effendi Sianipar.

F-PDIP (Ir. EFFENDI SIANIPAR):

Terima kasih.

Pimpinan Komisi IV, rekan-rekan Anggota Komisi IV DPR RI dan juga yang saya hormati Bapak Menteri Kelautan, serta rekan-rekan dari Kelautan Eselon I.

Pada hari ini saya sangat melihat rapat yang sangat kondusif di Komisi IV ini dengan Kelautan. Kenapa? Karena memang Ketuanya menguasai masalah perikanan dan kelautan dan juga Menterinya menguasai. Jadi saya kira kita tadi tidak berpandang lebar, kemarin-kemarin kita rapat agak suasana tegang, dan dari tadi saya perhatikan kok ini lunak banget. Rupanya kan sudah bersaudaralah antara Menteri dan Pimpinan Sidang, terima kasih. Dan yang saya sorot, yang saya baca tadi bahwa masalah pengawasan. Masalah anggaran pengawasan tidak sebanding dengan nilai yang dikerjakan oleh Dirjen, jadi sangat sedikit. Dan juga serapannya sudah 99%, sedangkan Dirjen yang lain belum ada penyerapannya sampai 98% saja. Jadi bagaimana nanti tumpang tindih. Ini habis telan biaya pengawasan, tinggal pelaksanaan tidak ada lagi yang mengawasi.

Jadi saya kira supaya ini biar pengawasan sama penelitian ini perlu ditambah, Silakan nanti diusulkan ke Banggar. Mungkin teman-teman di Banggar bisa memperjuangkan. Dan yang lain saya kira suasana ini terus kita perhatikan. Dan ada beberapa catatan yang dari dulu membuat kita ramai di Komisi IV yaitu mengenai peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri. Jadi saya kira coba dikaji oleh Kementerian yang baru, tentu Pak Menteri kan mantan Ketua Komisi IV tahulah aspirasi-aspirasi dibawah mengenai keributan-keributan kita dulu mengenai peraturan-peraturan Kementerian. Jadi supaya diperbaiki supaya tercapai sasaran-sasaran yang kita inginkan. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Menteri dan selamat kepada Ketua Komisi, mari kita bergandengan tangan dan juga dengan para wakil karena kita ada dibelakang Bapak-Bapak sekalian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Effendi.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Yang hadir disini sudah bertanya semua. Saya usulkan kita break dulu 30 menit untuk ISHOMA kembali kedalam ruang rapat ini pukul 13.30. Untuk yang virtual silakan makan siang di rumah masing-masing.

Saya skors dulu 30 menit.

**(RAPAT DI SKORS SELAMA 30 MENIT)
(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 13.30 WIB)**

Selanjutnya saya minta kepada yang virtual untuk bicara jangan panjang lebar, fokus kepada laporan BPK serta rencana Tahun Anggaran 2021.

Yang pertama Pak Bambang Purwanto, silakan.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan rekan-rekan Anggota, serta
Yang saya hormati Pak Menteri beserta seluruh jajarannya.

Kami singkat saja terkait dengan kondisi *real* dilapangan, Mudah-mudahan ini bisa masuk didalam program di 2021. Terkait dengan nasib nelayan yang selama ini barangkali bantuannya sudah cukup banyak dari tahun ke tahun tetapi ekonomi nelayan tidak beranjak dengan baik. Oleh karena itu setelah saya cek pada saat Reses sehari-hari ternyata memang

nelayan ini sangat tergantung dengan tengkulak. Sehingga ketika mau berangkat melaut mereka minta bantuan atau dibantu dengan bahan bakar dan perbekalan yang lainnya ketika kembali mendarat ikan langsung diserahkan kepada tengkulak. Nah tengkulak inilah yang menentukan harga. Sehingga (suara terputus/sinyal tidak bagus).

Kemudian alat tangkap. Alat tangkapnya juga kalau saya amati jenis kapal, kemudian alat tangkapnya masih belum memadai sesuai dengan kondisi laut masing-masing.

Kemudian Kalimantan Tengah ini nelayan air tawarnya sungai ini juga sangat banyak karena sungainya sangat besar-besar. Ada 5 sungai besar-besar di Kalimantan Tengah tentu nelayan juga banyak sehingga perlu juga mendapatkan perhatian.

Kemudian pembudidaya ikan. Pembudidaya ikan ini yang jadi permasalahan adalah harga pakan yang sangat tinggi. Kemudian ini ada solusi sebenarnya yaitu pabrik tepung. Ini yang saya minta oleh Kementerian supaya ini ditangani dengan serius karena ini boilernya masih perlu peningkatan kapasitas. Kalau pabrik tepung ini berhasil dan bisa memproduksi dengan baik. Ini juga bisa kerjasama dengan para nelayan. Karena ini juga ada koperasinya. Sehingga nelayan bisa ambil bahan bakar ke koperasi ini kemudian harga tentu lebih professional. Kemudian tepung ikan ini bisa mendorong pakan mandiri yang ada di daerah termasuk Sampit, kemudian Palangkaraya, Kapuas sehingga dapat menyelesaikan harga pakan yang cukup mahal sampai saat ini. Sehingga ini harapan kami. Kuncinya ada di pabrik tepung. Kalau pabrik tepung ini baik, saya siap untuk membantu KKP di daerah, membina para nelayan yang ada di Kalimantan Tengah ini. Tinggal Pak Menteri ini perlu melakukan evaluasi karena kemarin saya sudah sampaikan ke Pak Dirjen bahwa Pak Dirjen juga siap ke Kalimantan Tengah untuk melihat langsung. Kami akan tunjukkan dan bisa komunikasi para nelayan kita di daerah.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Bambang.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Pak Pimpinan, mudah-mudahan kondisi riil permasalahan riil yang ada di daerah terkait dengan nelayan, baik nelayan laut maupun air tawar bisa mendapatkan perhatian secara serius.

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA KOMISI IV (SUDIN, S.E./F-PDIP):

Selanjutnya Ibu Endang. Silakan. Singkat, padat Bu.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOARI, DESS., M.Sc.):

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Menteri yang saya hormati dan saya banggakan.

Tentu saja kami sangat bangga karena Bapak sempat ke Cidaun dan ada 3 acara yang kita laksanakan. Yang 1 bulan karantina, semua dapat *appreciate* Pak dari masyarakat, mereka gembira.

Yang kedua tentang safari gemar ikan. Jadi Pak saya mohon ijin kami karena di Jawa Barat itu angka *stunting* tinggi. Jadi kami bekerjasama dengan Balai Penelitian Pasca Panen dan Balai Penelitian Rempah Obat untuk mendesain ikan-ikan ini menjadi makanan khas lokal yang untuk anak-anak yaitu dengan mencampur cassava, kemudian sagu dijadikan mie dan kroket yang berbasis ikan. Dan *appreciate* dari Walikota sehingga Walikota hadir pada *launching* gemar makan ikan ini dan kebetulan juga Bogor ini dapat penghargaan dari Pemerintah Jawa Barat karena Bogor bisa mensukseskan gemar makan ikan dengan baik di Kebun Raya Bogor. Nah untuk itu kami mohon juga ingin kerjasama dengan Kementerian LHK karena kami juga sedang memproduksi maggot yang bisa menjadi makanan ikan dan ternyata hasilnya bagus.

Kemudian yang ketiga ternyata ada permintaan dari teman-teman nelayan yang ada di Caracas yaitu di kawasan KJA Jangari minta didorong untuk jadi kawasan pariwisata. Jadi untuk itu dibantu dengan kapal-kapal yang bisa keliling dan bisa menjadi mendatangkan wisata-wisata baik dari dalam maupun dari luar negeri. Nah di Cidaun juga ada masalah yaitu ingin minta bantuan pelebaran kolam Pak. Pelebaran kolam labuh. Nah untuk itu masyarakat ingin sekali bisa akses ke Pelabuhan itu untuk bisa mengekspor ikan-ikannya. Nah sayang sekali Pak, saya tidak bisa mendampingi Pak Menteri karena saya ada janji untuk *launching* Safari Gemar Ikan.

Nah kemudian yang berikutnya Pak, tentang garam. Jadi kami sudah mengambil sampel garam dan ternyata garamnya itu bisa dijadikan garam untuk kecantikan Pak. Jadi untuk estetika. Nah untuk itu mohon didorong karena ini juga suatu kesempatan bagi nelayan-nelayan untuk menambah incomenya kesejahteraan para nelayan.

Hanya itu saja Pak.

Terima kasih. Sekali lagi kami bangga dengan kehadiran Bapak di Cidaun menjadi dorongan bagi masyarakat nelayan menghasilkan ikannya dengan baik.

Terima kasih.

*Wabilluhitaufiq Walhidayah,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Sutrisno.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

Para Pimpinan, Anggota dan Pak Menteri serta jajaran.

Langsung saja Pak Menteri. Yang pertama, Kementerian yang Bapak pimpin itu menyangkut 2 hal yang mendasar kelautan dan perikanan atau ikan laut dan ikan tawar. Kalau saya cermati masalah anggaran nampaknya didominasi oleh kelautan. Oleh karena itu dengan program Bapak melalui gemar atau mari gemar Ikan dan juga BPPMT pun juga bisa menampung ikan sebagai pengganti daging agar penganggaran ini ada suatu keseimbangan. Agar rakyat yang di Pedalaman jauh dari laut ini punya peluang untuk mengembangkan usaha disektor perikanan. Peluangnya sangat besar. Dengan adanya safari gemar ikan, dengan adanya BPPMT masyarakat-masyarakat miskin bisa mengembangkan disektor itu. Jadi mohon untuk ada keseimbangan terutama di Dirjen Perikanan Budidaya.

Kemudian kedua Pak Menteri, salam dari Pak Bupati Subang yang telah menyampaikan 3 surat sama Bapak. Yang pertama disampaikan di awal Desember 2019 terkait dengan permasalahan nelayan dan dampak pembangunan laut internal di Patimban.

Yang kedua diawal Maret 2020 berkait dengan banjir yang diakibatkan debit air hujan yang begitu tinggi. Dan terakhir di awal Januari tanggal 10 Januari, 10 Juni terkait dengan rob yang disampaikan oleh Pak Ono. Kami mohon untuk menjaga kepercayaan publik kepada Pemerintah agar direspon, disikapi, dianalisis, dikaji dan tentunya mohon untuk dijawab agar supaya rakyat pun juga, entah apa pun yang menjadi keputusan Bapak pasti rakyat akan menerimanya.

Dan yang ketiga, juga Bapak perlu ketahui bahwa di Dapil kami khususnya di Sumedang ada bendungan Jati Gede, yang proses pembangunannya berpuluh-puluh tahun. Mengakibatkan dengan adanya bendungan itu mengubah mata pencaharian rakyat dari petani menjadi nelayan. Nah saat ini rakyat disekitar bendungan itu agak kesulitan mencari kehidupan karena belum berpengalaman didalam menjadi seorang nelayan. Yang diminta oleh mereka mohon ada bimbingan. Yang kedua, diberikan peralatan untuk bisa menggapai kehidupan mencari nafkah dari bendungan itu, dan juga peralatan-peralatan yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata dibendungan itu.

Saya kira itu saja dari saya.

Terima kasih Pak Menteri.

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Hermanto. Ada Pak Hermanto? Pak Hermanto tidak ada.

Ibu Maria Lestari ada? Silakan.

F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd.):

Baik.

Terima kasih Pimpinan.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Rapat, Ketua, Wakil Ketua serta rekan-rekan Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran yang saya hormati, Bapak/Ibu hadirin sekalian yang berbahagia.

Pada kesempatan yang baik ini saya menyoroti terkait dengan infrastruktur pendukung dibidang kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Dalam rangka persiapan operasional Pelabuhan Kijing di Kabupaten Meumpawah.

Ijin Pak kedengaran Pak?

KETUA RAPAT:

Jelas. Jadi ngomongnya agak cepat. Jelas, jelas sekali.

F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd.):

Baik. Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pelabuhan laut dalam. Kalau tidak.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Bu, gambar Ibu tidak kelihatan.

F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd.):

Kemarin direncanakan akan beroperasi pada Tahun 2021. Nah paling lambat atau 2022 katanya. Nah pelabuhan tersebut nantinya akan menjadi pintu utama ekspor-impor di provinsi Kalimantan Barat. Nah untuk itu tentu perlu menjadi perhatian BKIPM dalam pengembangan wilayah tugas dan fungsinya dalam hal ini perlu dipersiapkan dukungan sarana-prasarana serta SDM, karantina dan menghuni saat yang Pelabuhan Kijing saat beroperasi.

Nah selanjutnya juga saya menyoroti terkaitnya kendala ekspor kita selama ini. Yang mana semua penerbangan masih transit di Jakarta Pak. Masih sangat sedikit penerbangan langsung ke negara tujuan ekspor. Nah pelabuhan saat ini disini pun pelabuhan sungai yang terpengaruh atau yang tergantung dari pasang surut air. Nah sehingga kapal-kapal harus menyesuaikan ukuran dan waktu berlayar. Nah kondisi tersebut tentu akan menghambat ekspor kita. Tentu juga akan menambah biaya bagi para eksportir kita. Nah mohon perhatiannya untuk KKP untuk mengambil perannya dalam menyikapi dan menyelesaikan persoalan tersebut.

Nah selanjutnya sebagai informasi dan catatan bahwa Kalimantan Barat merupakan salah satu penghasil ikan hias arwan terbaik didunia. Nah untuk itu perlu disikapi dengan baik terkait peralihan kewenangan dari BKSDAD ke.

KETUA RAPAT:

Bu Maria, itu Tupoksinya Kehutanan.

F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd.):

sumber daya alam ke KKP dalam hal ini BPSPL (Balai Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut). Proses ekspor maupun domestik ikan hias khususnya arwana bisa tetap jalan langsung.

Berikutnya adalah terkait dengan wilayah perbatasan laut kita, dalam hal ini Kabupaten Sambas yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Dengan banyaknya nelayan tradisional yang masih sangat memerlukan sarana dan prasarana antara lain: alat tangkap dan sebagainya termasuk penambahan kuota BBM dalam hal ini adalah solar. Nah informasi melalui Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sambas bahwa kecamatan prioritas adalah Kecamatan Sakao, Jawai dan Paloh sebagai Kecamatan perbatasan langsung.

Nah selanjutnya terkait dengan perlindungan atau proteksi terhadap nelayan. Kita juga untuk menjadi perhatian serius ini. Karena dari semua baik berupa pemberian asuransi atau sejenisnya. Ini bantuan untuk nelayan kita Pak, apakah disini ada bantuan untuk asuransi untuk nelayan kita karena persoalan atau kebutuhan utama bagi nelayan tradisional kita karena ini adalah alat tangkap juga penunjuk arah. Nah alat lampu juga diperlukan dan pabrik es mininya.

Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih dan selamat siang.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Bagus Adhi. Ada Pak Bagus Adhi?

F-PG (A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

*Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Om Swastiastu,*

Yang saya hormati Pak Menteri,

Minal Aidzin Wal'faidzin semoga tetap sehat selalu. Jadi saya pada prinsipnya memberikan apresiasi kepada Pak Menteri karena KKP ini sudah lama sekali puasa. Nah sekarang sudah predikatnya sudah meningkat. Nah jadi saya sangat sependapat sekali. Dan mudah-mudahan teman-teman di Banggar bisa memperjuangkan kenaikan dari pagu anggaran yang sudah ada, Minimal dapat Rp7 T-lah Ini yang menurut saya. Tapi bila apa nanti itu nanti itu tercapai harapan saya Pak Menteri program-program pemberdayaan masyarakat tentunya. Dan besaran anggaran itu seperti tadi Anggota lain juga menyampaikan bagaimana kita mempunyai tolak ukur yang jelas, baik dibidang tangkap, budidaya, dan sebagainya.

Nah disinilah kalau menurut saya penting kita berdayakan di Riset dan pengembangan SDM. Nah sehingga Pak Menteri tidak susah-susah dengan mengkaji setiap program sejauhmana dia mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak tenaga-tenaga kita yang sudah lama bersekolah di Luar Negeri yang banyak di luar Indonesia yang S2, S3 tarik ke Indonesia membuat kajian, memberikan pendampingan kepada masyarakat, Nah sehingga nelayan kita bisa benar-benar sejahtera.

Yang kemudian di Budidaya. Sangat miris sekali. Dibudidaya bagaimana sih cara memelihara biar bisa 1,5 bulan panen besar. Ini perlu teknologi yang dibutuhkan, begitu juga dilobster. Nah sekarang kita pada kesempatan ini masyarakat sudah lebih banyak pada nelayan khususnya di daerah-daerah yang dekat dengan Pesisir sudah kembali berlayar. Sudah kembali dia membuat kerambah-kerambah yang sederhana. Nah ini kalau kita bisa dalam anggaran nanti kita tingkatkan dengan kerambah jaring apung. Nah ini penting juga. Dan juga didalam meningkatkan makanan sehat melalui masyarakat. Tadi Pak Menteri bilang dalam penyegaran *stunting*. Saya setuju sekali. Dan ikan salah satunya solusi untuk hal ini. Nah sekarang untuk kita pengkajian dimana dia memberikan pakan ikan yang bermutu. Nah disini perlu kita tingkatkan bagaimana budidaya, baik didaratan ataupun di laut. Nah ini penting sekali. Bagaimana teknologi dalam meningkatkan budidaya lobster sehingga kita bisa menghasilkan lobster-lobster unggul yang bisa tidak hanya mengekspor bahwa benih lobster tapi kita bisa mengekspor lobster yang besar. Nah ini yang penting sekali yang menjadi perhatian dan juga program gemar makan ikan. Mesti ditingkatkan Pak Menteri gemar ikannya.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Bagus Adhi.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.):

Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang intinya program makan ini harus berbasis penelitian dan berbasis riset yang bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah.

Itu kira-kira Bapak Pimpinan yang bisa saya sampaikan. Semoga perikanan Indonesia semakin mantap kedepannya.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Rudi dari Fraksi PAN Kapoksi. Silakan.

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Para Pimpinan Komisi Pak Ketua Pak Sudin,
Pak Menteri dan teman-teman sekalian.

Pak Menteri, saya berterima kasih. Hari ini saya ikut menebarkan ada 2 juta benih udang vaname untuk pembudidaya di Pulau Sumbawa. Terima kasih Pak Menteri, mudah-mudahan dapat bermanfaat.

Kemudian ini saya menyampaikan bahwa beberapa nelayan di Kabupaten Sumbawa yang rumponnya. Rumponnya dilepas oleh adanya survey nasional migas. Sehingga terlintas oleh survey tersebut hingga rumponnya dilepas. Oleh karenanya sekarang di mediasi, Sehingga nelayan kita tidak dirugikan. Karena ini adalah proyek nasional dan harus tetap berjalan.

Nah kemudian yang ketiga, pada Dirjen Tangkap saya beberapa waktu lalu kami dari Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Sumbawa sudah mengirimkan proposal untuk membantu perbaikan jembatan di Desa Laboan Jambu Kecamatan Tarano, yang mana jembatan itu adalah dipergunakan untuk nelayan kita. Jadi sekarang ini dibangun swadaya. Dan mudah-mudahan pada anggaran kedepan dapat dibantu Pak Menteri sehingga dapat berdaya maksimal untuk kegiatan nelayan.

Kemudian yang terakhir, saya tidak tahu nih pada rapat hari ini apakah Direktur Benih Pak Cocon ada, hadir? Saya memonitor ada 135 kerambah jaring apung untuk Nusa Tenggara Barat semuanya dan di Kabupaten Sumbawa ada 15. Kalau memungkinkan bisa ditinjau kembali agar perluasan rencana pembudidayaan lobster tersebut juga bisa merambah sampai ke Kabupaten Sumbawa, kemudian Dompu, bahkan ke Bima karena sangat besar sekali potensi yang bisa kita harapkan.

Saya kira itu Pak Menteri. Pak Ketua. Mohon maaf Pak Menteri belum bisa sampai di lapangan karena sekarang masih di kampung halaman.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Slamet dari Fraksi PKS.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang saya hormati Pimpinan, Ketua Komisi beserta Pimpinan yang lain ..., Pak Menteri beserta seluruh jajarannya.

Terima kasih atas dan pertama sekali memberikan apresiasi, terima kasih atas kunjungannya ke Dapil saya Kabupaten Sukabumi dan mengundang saya sehingga saya bisa berkesempatan untuk mendampingi.

Ada beberapa yang ingin saya sampaikan Pak Ketua termasuk kepada Pak Menteri. Yang pertama terkait dengan evaluasi kinerja maka nampaknya perlu dilengkapi. Tidak hanya realisasi dari pagu atau serapannya berapa persen tetapi sejauhmana keberhasilan antara lain sedari awal yang sudah ditentukan, indikator awal keberhasilan yang sudah ditentukan dengan hasil yang saya pikir dalam rangka pengawasan kita sebagai Anggota Dewan nampaknya juga perlu mengetahui itu sehingga perlu disempurnakan dari presentasinya.

Yang kedua yaitu ingin menanyakan Pak Menteri, kalau tidak salah kemarin di Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi kan bagi-bagi sertifikat itu pada para nelayan. Ini program apa, sasarannya apa dan kira-kira sekedar KKP ini membagikan atau memang anggarannya dari situ. Ya karena memang ditempat lain itu juga sangat banyak permasalahan terkait dengan pertanahan termasuk di Sukabumi bagian itu. Kemarin sempat bagi-bagi sertifikat, mungkin perlu penjelasan disini.

Berikutnya menyampaikan aspirasi juga. Tidak jauh dari tempat yang dikunjungi Pak Menteri kemarin ada 1 tempat untuk pembangunan pelelangan ikan yang sudah mangkrak dan langsung dijanjikan oleh Pak Luhut Panjaitan Menteri Koordinator Maritim. Saat itu didepan masyarakat ingin dibangun sehingga dalam kesempatan ini kami berharap mudah-mudahan di Tahun 2021 ada anggaran yang bisa disampaikan untuk meneruskan sekaligus membayar janji yang sudah disampaikan oleh Pak Luhut yang didepan masyarakat itu Pak Menteri.

Nah saya juga sependapat. Berikutnya bagaimana kemudian 2021 harus tersampaikan berapa sih target PNBPN yang ingin didapatkan KKP. Saat

evaluasi ini juga harus disampaikan, dapatnya berapa. Sehingga kita juga bisa dalam rangka pengawasan ini menjadi penting untuk di itu.

Terakhir Pak Menteri. Jadi ini mengacu juga bahwa program-program 2021 maka nampaknya harus menyentuh kepada produktivitas dari nelayan karena kalau saya baca di target RPJMN yang dari program TSM itu diharapkan produktivitas nelayan naik 5%. Kalau nanti di 2021 makanya anggaran dan program maupun kegiatan harus mencerminkan itu. Sementara kalau kita sandingkan dengan survey dari Bank Indonesia maka angka tenaga sektor perikanan ini di survey itu turunnya yang paling tajam diantara sektor-sektor yang lain.

Artinya apa? Bahwa program Kementerian kalau 2021 dan selanjutnya itu tidak menyentuh kepada nelayan maka yang seperti sebelumnya saya sampaikan, tidak hanya kita akan impor dari barang-barang itu bahkan nelayannya nanti kita tidak ada, pada akhirnya nelayannya sendiri kita akan impor dari luar negeri karena tidak akan yang tertarik dari masyarakat kita atau menjadi mata pencaharian yang terpaksa saja karena tidak ada yang lain.

Itu saja beberapa catatan dan masukan.

Pak Ketua, Pak Menteri, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kemudian ditindaklanjuti. Sekali lagi mohon mudah-mudahan jadi ... bisa dimasukkan kedalam 2021 ini.

Terima kasih Pak Ketua.

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Demikian pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV. Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan jawabannya. Saran saya Pak Menteri, jangan banyak prolog. Yang beberapa pertanyaan dijadikan satu jawabannya supaya cepat selesai.

Terima kasih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Ketua dan Wakil Ketua,
Bapak/Ibu Anggota Komisi IV DPR RI,
Para hadirin sekalian.

Saya langsung dari Pak Muslim tadi tentang, terima kasih atas dukungannya. Tentang *illegal fishing* kami terus komit dimana saja di wilayah Indonesia kita jaga.

Kemudian tambak, tadi banyak yang menanyakan tentang tambak Bapak/Ibu sekalian. Tadi Pak Haerudin juga menyampaikan kita bangkrut. Saya koreksi Pak Haerudin, kita tidak bangkrut. Pengertian bangkrut itu kita tidak ada lagi sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Bangkrut, kalau pengertian bangkrut hanya karena tidak ada cash itu hanya masalah bagaimana sih Pemimpin bisa mencari, dan kami tidak akan pernah tidur untuk merealisasikan. Dan saya sangat yakin Indonesia adalah negara kaya, tidak akan pernah bangkrut. Selama kita semua mampu memanfaatkan dan saya yakin di sektor kelautan dan perikanan kita kaya sekali.

Jadi itu koreksi dan secara prinsip memang cash agak sulit tapi kami percaya banyak cara, tadi sudah saya jelaskan diawal Pak Ketua dan semua Bapak/Ibu Anggota Komisi IV. Ada cara-cara intervensi-intervensi yang bisa kita lakukan tidak harus menunggu APBN. APBN itu paling banyak kalau kita lihat 6 Triliun saja dibandingkan dengan secara nasional sangat kecil sekali. Tapi punya acara lain, salah satunya dengan KUR. Sebelum KUR kita ada BLU. BLU ini nanti saya akan minta menghadap khusus ditambahkan lagi. Tapi sebelum saya minta tambahan saya pastikan 1 Triliun ini benar tidak bisa kita gunakan. Karena sampai saat ini Pak Ketua, KUR sejak jaman periode ke-2 Pak Ketua dulu itu 1,3 Triliun. Sekarang yang terserap baru 300-an. Tapi dari 300-an Alhamdulillah NPL-nya itu 2,5%, tidak sampai dari 2,5%. Artinya masih sangat baik dan kita membukukan keuntungan Rp76 Miliar dari pengucuran KUR. Artinya sebenarnya tidak ada lagi yang diragukan kalau dengan bukti dalam perjalanan ini sudah berjalan dengan bagus, artinya peluang ini harus bisa kita buktikan.

Nah tambak salah satu potensi dari banyak pertanyaan tadi yang menanyakan tambak. Kita tidak hanya seolah-olah tambak menjadi prioritas, tidak. Memang perintah dari Rapat Terbatas disana, saya yakin Komisi IV juga sepakat. Potensi ini adalah potensi terbaik yang mudah segera kita laksanakan. Dalam kondisi COVID harga udang justru malah meningkat, permintaan udang sangat tinggi. Indonesia belum ada 1 juta ton setahun produktivitasnya. Ini dari hasil kajian Dirjen budidaya. Dan kami harapkan kita harus kejar ini. Kebutuhan dunia sampai 13 sampai 15 Juta ton udang basah, Nah ini adalah peluang. Harga bagus, potensi ada, lahan ada, sumber daya manusia ada, tinggal kita mampu merealisasikan. Dari sini saya sangat yakin ini bisa direalisasikan.

Tadi juga ada pertanyaan tentang PNB. PNB Tahun 2019, kita Rp756,51 Triliun. Ini meningkat jauh daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau diperikanan 518 itu adalah yang tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kita berharap untuk Tahun 2020 ini per Bulan Juni ini kita sudah menginjak di angka Rp344 Triliun. Kita berharap akhir tahun kita akan melampaui. Mohon Rp344 Miliar. Target kami kalau bisa diatas Rp1 Triliun Pak. Karena ini menjadi catatan dan garis bawahi dalam Rapat Terbatas, karena KKP masih

sangat kecil. Namun ini perlu kerja keras dan kami sangat yakin potensi yang ada bisa menjawab itu.

Tentang ekspor lobster. Saya juga harus bicara terbuka disini. Harus kami sampaikan. Masalah lobster, peraturan yang kita evaluasi itu tidak muncul begitu saja atau hanya keputusan seorang Menteri. Kami melakukan penelaahan dan hasil penelitian berdasarkan ahli-ahli yang ada. Melalui kajian, melalui debat terbuka di publik, Ini ada semua. Dan lobster itu secara alamiah kalau dialam hidupnya hanya, untuk bertahan hidup dia hanya 0,2% saja.

Tadi pertanyaan Pak Ansy tentang 2% terlalu sedikit. Sebenarnya 2% ini sudah 10 kali dari alam menyediakan. Jadi kalau kita lepas dialam saja. Biarkan alam. Artinya, tadinya banyak. Saya inginnya 5% Pak Ansy, Tapi ada keseimbangan yang kita hitung. 2% ini saya pikir sudah 10 kalinya daripada alam menyediakan.

Nah kita takutnya kalau berlebihan juga malah tidak bagus. Ini kita lihat dulu. Ini kan prosesnya tidak serta merta begitu kita terapkan *clear and clean* tidak kita ganti lagi, tidak. Apa pun kebijakan yang kami buat ada proses yang bisa selalu dievaluasi setiap saat. Kami sangat menerima masukan dan usulan-usulan, ada yang debat, ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra pun kita undang, dan kita sudah terbuka dimedia, ditempat umum kita ajak mereka berdebat. Tidak melibatkan hanya pengusaha atau korporasi karena memang ini tidak bisa dilakukan hanya korporasi. Karena penangkapnya ini adalah nelayan, melibatkan nelayan. Sampai hari ini terdaftar 13.000 nelayan yang terus bertumbuh dan bertambah. Ini yang dulu sebenarnya periode lalu, 5 tahun lalu yang menjadi perdebatan keras. Karena ditutup mereka tidak bisa makan, mereka tidak bisa mencari pendapatan. Ini sebenarnya yang kita tarik pertama. Bahwa masalah ekspor, masalah PNBPNya. PNBPN itu berdasarkan tingkatan. Tadinya secara jujur yang diberlakukan untuk PNBPN adalah bukan nelayannya yang bayar PNBPN. Yang bayar PNBPN ini yang akan melakukan ekspor. Kalau dia tidak ekspor di budidaya ya sudah tidak ada lagi PNBPN. Dan dia hanya bisa melakukan ekspor kalau dia ada program budidayanya, ada pertanyaannya. Kok langsung ekspor? Begini Pak, mereka menangkap sudah melakukan budidaya. Yang ditangkap yang sudah dibeli dengan masyarakat. In kan ada sisa. Karena kemampuan budidayanya tidak siap. Kemampuan budidaya tidak siap ini akibatnya kurang banyak, sementara yang diambil ada kan tidak mungkin kita kembalikan, Rugi si pengusaha. Ada potensi pasar yang diekspor. Tadi diekspor.

Jadi kita lepas makanya kita pajakin, kita ongkosin. Maksimal mau saya 5000 per kilo. Tapi ternyata ada aturan itu berdasarkan margin yang mereka peroleh. Kalau untuk 10.000 nilainya di Luar Negeri dia dinilai 2000 Rupiah. Terus bertingkat sampai kalau 25.000 sampai 3000 atau 4000-an. Ini nanti aturannya, dan sangat transparan. Saya sangat yakin, tantangan ini adalah suatu peluang bagi kami. Dan sampai kapan pertanyaannya. Pertanyaannya sampai kita sudah siap semua ekspor itu tidak akan dilakukan untuk benih. Tapi kan ekspor dari hasil budidaya tetap jalan.

Kemudian bisa saja nanti setelah tahun depan setelah dievaluasi berapa jumlah ternyata tidak bisa dilakukan lagi ya kita tidak akan melakukan. Ini tiap tahun ada evaluasi Pak Ansy Lema. Jadi tidak ada, dan kalau dilihat proses saya pikir sudah ada time tablenya. Kita sudah 7 bulan - 8 bulan saya jadi Menteri proses debat publik dan komunikasi dan konsultasi publik sudah dilakukan berkali-kali. Tidak hanya sekali. Bahkan kami melihat, memang banyak orang selalu mengatasmamakan ini akan punah, akan punah. Kami juga tidak ingin melakukan sesuatu dengan dasar tanpa hitungan, membiarkan kepunahan, tidak. Karena waktu ke Tasmania ahli lobster dunia, dia menghitung. Saya waktu itu menghitung berdasarkan hanya 500.000 1 ekor lobster bertelur setahun. Tapi di Tasmania Beliau secara terbuka menyampaikan, Saudara Menteri ini lobster bulan ini akan lahir 1 juta telur. Wah bagus saya sudah senang 1 juta, tapi ternyata bulan depan akan lahir 1 juta. Bulan depannya lagi 1 juta sampai 4 kali. Kok bisa? Karena disini musim panasnya 4 bulan. Berarti di Indonesia bisa sepanjang tahun. Itu harus diteliti. Kalau mengacu dengan angka itu berarti 4 juta, berarti 8 kali daripada yang kita sampaikan. Padahal penelitian kita mengatakan ada 27 Miliar jenis lobster yang ada di kita. Dibagi 6 karena ada 6 jenis lobster. Ada sekitar 22,6 Miliar. Kalau diambil 10%-nya saja 260. Padahal tingkat kepunahan itu kalau 10% sangat jauh. Setengahnya saja diambil saya sangat yakin tidak. Kalau mengaca kepada potensi dan peluang, dan mengaca kepada lingkungan sebenarnya dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Tapi sekali lagi Bapak/Ibu sekalian, saya tidak ingin terbang pilih dengan dasar apalagi. Hanya dasar alasan kebutuhan, masyarakat ingin makan, atau alasan kesempatan dalam kesempatan saya juga tidak mau. Ini kami lakukan dengan dasar ilmiah, hitungan, kajian, dan saya siap mempertanggungjawabkan sampai selesai.

Kemudian masalah.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pimpinan, ijin interupsi Pimpinan. Sedikit.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri,

Saya juga mohon penjelasan soal saya menerima yang dijelaskan. Artinya saya menangkap secara baik. Yang belum dijelaskan itu adalah soal terutama dalam aspek teknologi dan menyiapkan kompetensi sumber daya manusia kita terkait dengan urusan perlobsteran ini Pak. Saya ingin lihat, kalau suatu saat kita mau bicara soal budidaya dan kemudian kita akan mengeksplor bukan lagi benih, berarti kan kita harus bereskan diaspek

teknologi dan sumber daya manusia. Nah itu saya mohon penjelasannya, apa yang dilakukan.

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua, boleh lanjut interupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

1 menit.

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

1 menit, tidak banyak-banyak soalnya Pak Ketua.

Pak Menteri,

Sekalian saya lanjut sama Pak Ansy Lema. Saya hanya ingin tahu berapa sesungguhnya kuota yang digariskan oleh PERMEN-KP itu untuk ekspor lobsternya.

Terus yang kedua, saya kalau boleh *flashback* dengan Pak Menteri, pada saat kita kunjungan ke Lombok 2015 sepengetahuan saya Pak Menteri waktu itu Ketua Komisi. Waktu itu kita temuan dengan nelayan lobster disana dan kesulitan untuk, karena ada larangan waktu itu. Saya kalau boleh berharap pembukaan lobster ini kan sebenarnya tujuannya kan untuk bagaimana agar nelayan-nelayan penangkap lobster ini terbedayakan. Maka saya boleh berharap bahwa prioritas pertama yang harus diberikan untuk ekspor lobster itu adalah para nelayan yang terdampak pada saat 5 tahun terakhir ini ditutup begitu Pak Menteri. Artinya berapa kuotanya, dan berapa untuk nelayan yang ada di Lombok atau dimana. Saya kebetulan bukan Dapil Lombok, tapi pada saat itu kita sama-sama berkunjung kesana dan ada problem terkait dengan kriminalitas pada saat itu. Kapolda NTB waktu itu mengingatkan bahwa gara-gara ditutup itu tingkat kriminalitasnya tinggi. Nah itu saya ingin menyampaikan itu Pak Menteri.

Itu Pak Ketua.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Baik.

Terima kasih Pak Ketua.

Bisa saya jawab. Pertama Pak Ansy Lema, masalah kemampuan anak-anak kita itu banyak. Bahkan sebelum ditutup itu secara alamiah mereka sudah melakukan, tidak perlu teknologi yang luar biasa. Hanya saja pengaturan terhadap supaya dia tidak mencemarkan laut dan sebagainya, pakannya, jenisnya. Ini yang kita ajarkan. Semua Balai kita sudah punya kemampuan untuk itu.

Kemudian masalah pertumbuhan. Saya pikir cara kita juga memberikan izin tidak asal sekedar menunjuk. Mereka harus mempresentasikan dahulu, kemudian terjadilah disitu perdebatan kan alih-alih kita. Kita ada Tim Panitianya. Setelah itu baru tinjauan ke lokasi. Dari lokasi aka dilihat kemampuan daya dukung dan kira-kira dimana. Kita tidak bisa ijin kalau memang ternyata lokasinya tidak memungkinkan. Kemudian kita juga butuh data, siapa nelayan-nelayan yang dilibatkan. Dan tidak mungkin nelayan itu tidak diajak.

Nah kalau seandainya ada kita yang menemukan nelayan yang terpinggirkan. Saya malah sangat yakin ini semua malah terjadi rebutan nelayan diantara para pelaku usaha ini. Yang saya khawatirkan itu. Jadi mereka atas nama kesini jadi rebut-rebutan karena jumlah penangkap ini juga yang sekarang ini juga terus kita cari dan kita gali. Yang jelas, kami harus lindungi mereka harga yang mereka beli. Itu harga yang kita beli dari mereka itu harus pasti, minimal 5000 untuk mereka dan tidak ada kena pajak. Mereka terima 5000 minimal sesuai dengan harga lobster di pasaran. Jadi Pak Ichsan tentang masalah kekhawatiran, kalau memang ternyata nanti masih usulan di Dapil Bapak/Ibu sekalian, ada nelayan yang tidak bisa atau yang tidak melibatkan saya yakin kami dengan siap untuk bisa menerima masukan itu.

Saya pikir Pak Ansy untuk teknologi kami siap. Dan untuk tekniknya juga. Sekarang kan sudah ada beberapa pihak termasuk kita sedang untuk menguji melahirkan lobster sendiri tanpa dari alam Pak Ansy. Tapi tarafnya belum sampai bisa karena baru sampai hari ke-14 atau berapa itu sebagian sudah melakukan uji coba kecuali yang sudah ambil dari alam. Telur dia telurkan sendiri itu berhasil, tapi kalau untuk dipijahkan, dikawinkan ini belum sampai ke proses sampai dia besar. Baru di hari ke 23-an hari Pak. Harusnya dia butuh sekitar 100 hari, 90 hari sampai 100 hari. Jadi ini butuh proses. Kedepannya lobster ini akan kita yakinkan bisa kita pijahkan sendiri. Karena di Australia, di Tasmania itu sudah mereka kembangbiakan sendiri di bantuan Pak Ansy Lema. Jadi saya yakin untuk masalah kepunahan, saya berani untuk yakini itu tidak.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pimpinan, saya interupsi lagi boleh?

Saya tanggapi sendiri Pak Menteri. Ya saya percayalah Kementerian KKP sudah buat kajian akademislah. Saya ingin tanya, memangnya sebelum Pak Edhy Prabowo itu kebijakannya kan beda Pak. Waktu itu mohon maaf Bapak-Bapak juga kan sebelum Pak Edhy Prabowo duduk menjadi Menteri. Itu kajian akademisnya seperti apa. Kenapa bisa berbeda sekali. Saya juga membaca banyak Pak, saya juga bukan orang ini tetapi ya mungkin di level Eselon I masih belum terjadi perubahan yang dari dulu sampai sekarang Pak. Tapi kenapa kebijakannya itu berubah itu. Itu yang saya ingin. Kalau Pak Edhy katakan, Pak Menteri katakan ada kajian sekarang kemudian lahir ini oke saya terima. Apakah yang dulu itu tidak ada kajian juga, atau yang dulu katakan juga ada kajian.

Nah mungkin itu Pak Edhy. Saya menerima saja yang dijelaskan seperti itu sembari mungkin saya akan mencari referensi yang lebih banyak untuk mencari tahu supaya jelas. Karena saya ini agak trauma Pak Ketua. Kita ini Bangsa Indonesia itu banyak punya produk-produk hebat. Saya kasih contoh dari kampung saya misalnya cendana misalnya, itu tinggal nama. Dibuat jalan cendana di Jakarta setelah itu sudah tidak ada lagi. Ada banyak produk yang model-model seperti itu Pak. Atas dasar itu kemudian saya ingin betul. Kalau memang aman cukup 2% Pak oke. Tetapi saya juga bingung kok dalam 1-2 tahun kajiannya itu berbeda. Nanti ya mungkin ahlinya berbeda atau bagaimana, saya berusaha secara pribadi saya akan untuk belajar juga nanti Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Ansy Lema,

Saran saya nanti kajian yang dimiliki oleh Kementerian KKP yang sekarang tolong diberikan ke Pak Ansy Lema untuk referensinya supaya dipelajari.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Baik Pak.

Saya ini bertanya karena terus terang saya berangkat dari orang yang awam Pak tetapi saya baca-baca terus sampai kepada kesimpulan makanya saya bertanya seperti ini Pak, tanpa bermaksud apa-apa tapi ini harus saya sampaikan karena jangan sampai nanti kebijakannya salah.

Terima kasih Pak.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Apalagi Bu Kiki?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Boleh interupsi Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Saya ingin menegaskan terkait yang tadi Pak Menteri yang dikatakan terkait lobster tadi. Kalau saya perspektifnya begini, menyambung juga dari

Pak Ansy dan Pak Ichsan bahwa kalau saya perspektif kebijakan ekspor ini. Kalau tidak salah melalui PERMEN 12 Tahun 2020, betul? Tadi Bapak bicara bahwa Bapak akan jaga budidaya dan segala macam itu tadi. Ya keberhasilan kita juga butuh. Karena begini Pak, kita ditanya juga oleh beberapa media tapi kan kami juga tidak berani jawab. Takutnya dalam arti kata takutnya kita belum ketemu satu jawaban yang pasti dari pihak Kementerian. Keberhasilan budidaya, kualifikasi Bapak melakukan ekspor, transparansi dalam penentuan para eksportir ini seperti apa. Nah ini penting juga agar kami juga dapat menjawab hal yang senada dengan KKP, seperti itu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya lanjutkan Pak Menteri.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Baik.

Saya pikir kalau ada yang mempertanyakan kami siap kok nanti untuk dicek dan diaudit. Dan ini semua kan berdasarkan keterbukaan. Kita dulu 5 tahun di DPR, saya pikri pertanyaannya sama. Dan sebenarnya tinggal menjawab pertanyaan dulu Cuma kan saya tidak elok kalau menjawab pertanyaan dulu langsung saya terapkan. Saya adakan juga ke ruang publik baru untuk mengajak semua stakeholder bahkan yang paling keras pun kita undang, ada yang datang, ada yang tidak datang. Tidak apa-apa, ini kan bagian resiko. Saya siap mempertanggungjawabkan ini, dan saya sangat punya keyakinan bahwa apa yang kami lakukan sudah dengan kajian yang mantap dan dengan kepentingan yang besar. Disamping itu dalam PERMEN itu juga kan dalam setiap tahun kita juga dievaluasi. Ada nanti jeda, kalau memang tidak bisa kita bisa batalkan juga. Artinya kita bisa kaji setiap saat. Hari ini, kapan semuanya dikaji. Cuma misal Pak Ansy menemukan perspektif yang berbeda misalnya. Ini dalam konteks ini ceroboh, celah tolong tunjukkan. Kami siap juga untuk membangun komunikasi dengan siapa saja. Ada keragu-raguan terhadap penunjukkan. Tunjuk perusahaan yang mana. Ada perusahaan yang merasa tidak diajak. Usul daftar saja karena pendaftarannya sangat terbuka. Ada si ekspor, Nah dalam pengaturan ekspor saya tidak bebaskan karena ada kekhawatiran. Begitu bebas nanti pengendalian terhadap negara tujuan ekspor itu nanti akan bias. Harga yang tadinya sudah sepakat tiba-tiba hancur. Ingat harga waktu ada pasir tempo hari. Si produsen terlalu banyak sementara yang beli Cuma 1, akhirnya harganya pecah. Yang biasanya 20 Cuma 3 Dollar, Itu contoh masa lalu. Semua ada resiko, tapi saya sangat yakin apa yang kami lakukan sudah berdasarkan kajian dan kami siap mempertanggungjawabkan.

Selanjutnya tentang cantrang. Cantrang juga, kami sangat sependapat. Kalau cantrang itu tidak bisa diterapkan disemua tempat. Karena juga ada nelayan-nelayan yang selama ini juga ribut antara nelayan besar dan nelayan

kecil. Total kapal cantrang yang besar diatas 30 GT itu Cuma ada 700-an, dibawah itu sisanya nelayan kecil-kecil dibawah 30 GT. Artinya nelayan kecil-kecil. Nah kalau ditanya akan berdebat antara nelayan besar sama nelayan kecil itu saya pikir agak sulit karena nelayan kecil itu dibawah 12 mil, kalau yang besar diatas 12 mil dimana kita, kalau ketemuan berarti pelanggaran. Seperti belum lama di Kalimantan Selatan sudah kita tangkap nelayan tapi kita akhirnya pembinaan kita lepaskan kembali supaya tidak ada sentuhan-sentuhan ini.

Kemudian ukuran. Ukuran.

KETUA RAPAT:

Santai saja jangan tegang. Santai saja,

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Ini penting karena menjadi *concern*. Ukuran, pembagian wilayah. Kemudian wilayah-wilayah operasi. Kalau tadi disampaikan tentang Natuna ya harus diakui karena kemarin kita agak tergesa-gesa. Harus diakui dan memang kan konsepnya waktu kita harus ngisi segera ZEE di Natuna 711. WPP 711. Ya kita ngisi dululah. Walaupun sebenarnya kita juga tahu sangat tidak pas tapi ya karena yang ada itu dulu kita isi biar ramai meramaikan, jangan diisi oleh nelayan lain. Karena disitu daerah yang setiap saat sangat penuh. Sampai hari ini kami menangkap ikan dari menangkap kapal ikan asing, dari 52 kapal itu. 2/3 itu dari Laut China Selatan. Ini kan kalau ada nelayan kita diharapkan. Nah sekarang kan ada alat tangkap yang tidak cocok misalnya cantrang, ini kan harus disesuaikan lagi. Nah ini kan butuh proses. Ya kami akui yang jelas semuanya kita penuh dengan keterbukaan. Saya juga tidak sendirian, waktu itu yang meleading sektornya adalah Menkopolhukam. Nah kita terus komunikasi 2 arah dan Alhamdulillah banyak langkah-langkah. Jadi kami tidak akan juga tutup mata, kemudian cantrang asal dilaksanakan. Dan tidak semua daerah juga bisa menggunakan cantrang.

Kemudian tentang *illegal fishing*, aturan dan segala macam. Memang Pak Ketua dengan pemotongan anggaran pengawasan kami sudah cukup banyak terpakai tapi Alhamdulillah dari Menteri Keuangan dalam Rapat Terbatas *Insha Allah* kita akan dapat tambahan anggaran diluar setelah pemotongan yaitu satu. Kami sudah diminta mengajukan Rp1,024 Triliun. Ini nanti akan kita pergunakan dengan menguatkan disektor budidaya, tangkap, pelabuhan-pelabuhan, PDS juga untuk nambah *cold storage* dan PSDKP. Nah ini Pak Ketua, ini diharapkan nanti memperkuat sektor-sektor yang tadi sempat terhenti. Tadi Ibu Riezky ngomong di *broodstock* di Musi Rawas, kita sudah rencanakan semua. Seperti sama yang waktu itu kami laporkan disini tapi akhirnya kan terpaksa harus kita hentikan. Tunda duklu, bukan dihentikan walaupun ditunda tapi juga dari Balai kita yang di Jambi juga sudah coba mengoptimalkan apa yang bisa kita lakukan. Tapi *broodstock* itu secara resmi sudah diserahkan Pak Bupati ke Pemerintah Pusat untuk kita yang melakukannya. Lumayan Bu itu, kalau itu bisa dilakukan daerah Musi Rawas

itu akan mempunyai basis penyiapan benih dan induk untuk ikan-ikan air tawar. Ya mohon sabar Bu, nanti tolong setiap saat di pantau.

Pak Abdullah Tuasikal, terima kasih tentang moratorium di Banda. Sudah ada pelaksanaannya. PERMEN-nya sudah siap, tinggal nanti menunggu resminya. Tapi intinya kami tetap menjaga, bertelurnya ikan ini tetap kita jaga tapi penikmatan terhadap sumber alam yang bisa diambil nelayan juga kami akan coba temukan, titik temunya seperti apa Pak. Masalah rumpon, saya pikir juga sama nanti kita tindaklanjuti Pak.

Pak Andi Akmal tadi sudah saya jawab.

Kemudian Pak Haerudin, masalah perahu-perahu yang rusak karena tsunami ini nanti cek. Intinya Pak, kalau Bapak menemukan dimana yang belum tersentuh mohon kami dikasih masukan.

Nah masalah udang vaname sekali lagi Pak. Memang inti utama yang kita khawatirkan, kalau tidak diawasi, tidak diatur dengan baik limbah udang ini 1 hektar produksi udang itu akan menghasilkan limbah baru mencemari 26 hektar air laut. Nah makanya metode Bapak kemarin lihat itu di Dewi Laut itu, itu konsepnya kan dilepas ke laut dia ada pembuangan di IPAL. IPAL ini nanti sampai ditanami ikan hidup baru dilepas ke laut. Dan Bapak lihat kemarin kan prosesnya, dan ini berlaku untuk semua tambak yang akan kita lakukan. Makanya kalau bicara tambak Bapak/Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya pikir forum yang berbahagia yang paling tepat untuk menyampaikan. Selama ini kan kita membantukan bantuan-bantuan sosial itu kan kayak gratis PNBP. Nah coba kita mulai dengan bantuan BLU yang kita miliki. Ada Rp1 Triliun BLU ini kalau bisa diserap. Kalau Bapak/Ibu punya binaan, misalnya kita bicara yang 1 tambak. Tambak perlu, kalau Bu Riezky tidak punya tambak. Dia tidak ada laut Pak Sudin. Jadi bisa mungkin keramba jaring apung di Danau yang ditempat Ibu itu ada. Nah jadi tidak usah banyak-banyak dulu. Fokus dengan wilayah 1 desa sekaligus pembinaan desa nelayan tadi untuk sekaligus bisa membangun sentra. Kita sudah punya rumusnya. Kalau memang perlu pembinaan BRSDM kami juga punya acara memberikan secara vokasi, pendidikan vokasi dan budidaya juga. Sekarang Pak Ketua, kami tidak ada lagi yang kerja sendiri-sendiri. Semua harus saling berkaitan. Kalau kita mau membangun kekuatan industri ikan yang berkelanjutan kalau berjalan sendiri-sendiri sudah tidak waktunya lagi. Jadi Pak Haerudin masalah limbah saya pikir ini sudah kita jawab, dan tinggal kita laksanakan dan terus kita awasi.

Pak Ono, tadi sudah sebagian saya tanya yang masalah banjir rob sudah kita tindaklanjuti kita butuh data, sedang ini pendataan. Sudah kita pikirkan untuk bagaimana yang akan kita bantu.

Untuk Bu Riezky terima kasih masalah selektif anggaran. ... program juga kami lakukan. Tadi pertanyaan tentang pasar ikan bertaraf internasional ini adalah program nasional RPJMN 2020. Ini dalam rangka untuk membuat bahwa Indonesia ini sebagai negara penghasil ikan punya standar khusus tentang ikan didunia. Jadi dunia itu akan melihat. Kalau mau melihat harga

ikan adalah sesuai harga Indonesia, kira-kira begitu semangatnya. Ini yang garis besar. Yang kecil-kecil di tiap-tiap sentra pelabuhan tetap kita isi-isi. Kami sangat tahu anggaran terbatas, tapi kami juga punya cara-cara untuk bisa menemukan itu. Termasuk sekarang para pelaku usaha sebelum COVID itu banyak sekali yang ingin bergabung masuk ke sektor ini tapi tertunda karena juga tidak bisa dengan mudah masuk ke Indonesia.

Kemudian Pak Ibnu, Mia Marine dan tadi Pia Marine. Pertanyaan Mia Marine dan Pia Marine. Pia Marinanya sudah selesai, dan Mia Marine sudah diaudit BPK tinggal kita setiap saat memberi kegiatan. Saya pikir ini tempat untuk pembelajaran dan semua staf-staf kita sudah pada masuk kesitu Pak Sudin. Pia Marine tetap kita laksanakan, Tidak ada istilah ini tempat siapa. Tapi itu adalah kenapa Pia Marine itu dibangun di Pangandaran waktu itu, karena itu adalah titik lempeng gunung berapi. Jadi sehingga disitu diharapkan bisa menjadi tempat control kalau ada apa-apa suatu saat. Ini sebagai penelitian. Mia Marine juga di Kampungnya Ibu Mus. Dan ini juga akan menjadi pusat pelajaran dan pelatihan bagi semua masyarakat disana.

Tentang gemar ikan. Terima kasih atas dukungannya. Kami siap untuk terus menambah selama anggarannya masih bisa dan masih ada.

Masalah keramba jaring apung Pangandaran. Sudah ada jalan keluar. Waktu itu kita agak sedikit bersengketa dengan BUMN yaitu Perinus. Dan sekarang sudah ada komitmen, Perinus akan menyelesaikan kerambah jaring apungnya akan kita pindahkan di Teluk Semangka Pak Sudin, yang ada di Lampung Barat. Ada 2, jadi ada yang di Jawa, Utara Jawa akan kita pindahkan kesana nanti yang akan bangun Perinus. Sekaligus nanti yang akan mengawal pemberdayaannya kita serahkan sepenuhnya Perinus untuk melibatkan semua nelayan-nelayan disekitar situ.

KETUA RAPAT:

Tadi sudah disampaikan Pak Dirut ke saya. Sekarang mungkin tidak kalau di Teluk Semangka itu. Disana ada Pelabuhan Tengker. Ingat, kalau masuk kesana posisi Barat laut lepas, Jangankan jaring apung, kapal tengker pun banyak yang kandas disana tersapu ombak.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Ya Pak, mohon ijin nanti kalau Bapak punya usulan lagi.

KETUA RAPAT:

Jadi kalau mau itu, tadi dikatakan bukan Teluk Semangka, di Mesuji. Betul? Tadi Mesuji? Sekarang kan kalau Mesuji itu kan daerah timur sana itu kan umumnya lumpur. Itu sudah tidak mungkin. Kalau Teluk Semangka itu, itu ada Pelabuhan Tengker dan tidak lama lagi itu dalam rancangan dibuat kawasan industri maritim. Itu dari 10 tahun lalu sudah ada kawasan itu. Jadi kalau cari lokasi itu yang itu kalau cari Kawasan itu benar itu city.

Pertama, sedikit pencemaran, kedua ombaknya. Jangan sampai terulang kembali. Tolong dicek ulang mengenai titik lokasi. Itu saja masukannya. Jadi sebelum dipindahkan cek ulang lagi termasuk konsultasi dengan BMKG, pasang tertinggi berapa, siklus 5 tahun, 10 tahun bagaimana, Ini yang penting. Karena kalau kemarin itu saya bilang kajiannya abal-abal. Norwegia bisa, beda. Lautnya beda, arusnya beda, siklus per tahunnya beda. Jadi jangan samakan disana bisa, disini tidak. Saran saya tolong dipelajari, jangan sampai Dirut Perinusya masuk penjara nanti.

Lanjut Pak Menteri.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Ya Pak Ketua, terima kasih masukannya. Nanti kami tindaklanjuti lagi. Tadinya pemilihan Teluk Semaka diantara semua yang pernah dilakukan oleh kerambah sebelumnya ini disitu masih jauh lebih tenang Pak Ketua. Bahwa ombak laut tidak mungkin tidak ada ombak kan Pak Ketua, tapi ombaknya di Teluk Semaka ada tempo-tempo memang besar. Kesalahan kemarin dalam penempatan ini sebelum dia selesai penempatan sudah kena ombak. Dia nanti fungsinya kan. Nanti kami tidak akan berdebat Pak Ketua. Kami terima masukan Pak Ketua. Nanti kita coba cari mana potensi yang lebih besar. Saya pikir di grup Perinus nanti komunikasi, konsultasi dengan Dirjen Budidaya dan PRL coba dikaji lagi. Terima kasih Pak Ketua.

Kemudian masalah bantuan yang akte tadi, yang pakai akte. Saya pikir sekali lagi ini mungkin kasuistis Pak. Saya pikir tidak perlu itu. Tidak perlu juga jaminan dari Bapak. Biasanya usulan bantuan itu ya sudah kita percayakan. Yang paling penting kita lihat setelah itu evaluasinya. Bantuan apa saja Pak dari KKP kecuali tadi BLU. Kalau BLU itu visibility tadi misalnya apa kita lihat persis, dan juga tidak sesulit kalau pakai mekanisme Bank. Cukup kalau koperasi ya koperasi atau kelompok nelayan, kelompok nelayan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak Ketua ijin.

Pak Menteri,

Saya baru cek di Tenaga Ahli saya kebetulan ada di atas. Kontak terus dengan Tim KKP itu, mereka tidak mau kalau tidak ada itu Pak. Makanya di kesempatan ini tolong direkam supaya nanti kirim ke orang itu.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Itu dimana?

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Di NTT. Yang melakukan verifikasi itu mandi angin. Di Sika, di Manggarai, sama di Rote ya. Manggarai dan Manggarai Timur dan Sika Pak.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Kalau yang di Kantor Pusat yang mewajibkan dan mengharuskan siapa Pak, dari Direktornya Pak?

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Siapa yang mengharuskan?

Staf saya masih di atas.

KETUA RAPAT:

Begini Pak Ansy lema. Kita pakai aturan. Yang diatas tidak boleh ngomong.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Oh sorry Pak.

KETUA RAPAT:

Kalau masalah itu nanti konsultasi dengan Dirjen Budidaya.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Mohon maaf Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Karena yang boleh ngomong itu yang hanya di ruangan ini, itu pun atas persetujuan Pimpinan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Mohon maaf Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Karena perlu diketahui Pak Menteri, kadang-kadang kalau kita urusan sama dinas ini agak susah, Apalagi beda partai. Itu pasti sulit Alasan beginilah, begitulah. Jelas kan? Kalau ada bantuan saya rasa tidak perlu ada rekomendasi dari Dinas. Karena pembudidaya itu kan sudah masuk kelompok. Kelompoknya tercatat, punya identitas di Dinas, Jadi tinggal dari Pusat cek ke lapangan, cek ke Dinas selesai sudah. Jadi kalau pakai-pakai rekomendasi tidak usahlah. Saya sendiri tidak setuju. Seperti yang saya katakan kemarin pun di Kementerian Pertanian pun begitu. Harus ada persetujuan surat pengantar Dinas, rekomendasi, apa. Ya kalau 1 partai ya gampang, kalau beda partai ya susah.

Lanjutkan Pak Menteri.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Ya Pak Ketua. Dari pertama komitmen kami tidak berubah Pak Ketua, yang namanya bantuan-bantuan tidak perlu. Mungkin ini perlu penyesuaian karena kan banyak. Ada 13.000 pegawai KKP seluruh Indonesia dan ada yang mungkin siap, tahu, percaya, mungkin juga dia berpikir Menterinya kan tidak lama kita tidak ngerti. Jadi ada keragu-raguan, dan makanya ini harus kita hadapi dengan pelan-pelan. Yang jelas Pak Ketua, datanya saja kalau. Saya tidak akan debat, karena secara prinsip sikap saya sudah sama dengan Pak Ketua untuk. Apa pun bantuan prinsipnya itu untuk masyarakat, Kalau pun gagal ya kan larinya di masyarakat, bukan siapa-siapa Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi maksud tadi Menterinya tidak lama mau pindah ke Selatan?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Eenggak Pak Ketua. Disini saja Pak Ketua.

Pak Ketua,

Masalah Desa Wisata, Pak Ansy Lema sekali lagi ini kawinkan saja dengan yang konsep BLU. Kalau nanti yang ada anggarannya bisa ditentukan, apalagi daerah Bapak kan berkepulauan. Sudah banyak dibuktikan bahwa Bupati-Bupati yang merubah cara pandangya ke laut dia bisa menikmati hasil lautnya. Salah satunya dengan budidaya rumput laut. Jadi kalau ini memang ada kami sangat ingin melakukan.

Pak Darori, masalah *disclaimer*. Saya pikir itu kan masa lalu dan kajian itu kan Pak Ansy yang lalu. Saya sih akan ngomong kedepan. Saya tidak mau bermaksud dengan yang lalu tapi saya melihat peluang kedepan ini cara berpikir yang saya terapkan. Jadi kalau *disclaimer*, kemudian tidak *disclaimer* ya mungkin karena Menterinya saja yang berbeda Pak Darori. Tapi itu belum diputuskan Pak. Ini belum ada keputusan *disclaimer* atau non *disclaimer*, baru temuan dilaporkan hasil penelitian, nanti hasilnya *disclaimer*, nanti pada waktunya. Saya tidak berani mendahului. Kita berdoa. Kami juga terus dengan kerja keras. Yang jelas teman-teman dari semua Kedirjenan setiap ada perubahan-perubahan, ada masukan-masukan langsung segera diperbaiki. Banyak hal dan saya yakin ini kerja keras dari teman-teman semua para Dirjen yang saya lihat wajahnya semangatnya sudah beda karena Ketua Komisi IV-nya Pak Sudin.

Undang-Undang 27 yang ada di Omnibus Law Cipta Lapangan Pekerjaan memang semangatnya dari Presiden arahannya adalah bagaimana membuat potensi investasi ini segera bisa terwujud dan bisa menghasilkan lapangan-lapangan pekerjaan. Karena yang ada selama ini investasi masuk Triliunan tapi realisasinya susah. Dan kami Kementerian KKP siap untuk

membuat yang namanya kemudahan-kemudahan itu menjadi prioritas. Dan yang paling penting Pak Darori apa yang diinvestasikan itu tidak dipersulit oleh perijinan. Jadi kami siap dan kalau pun nanti konsekuensinya harus kewenangannya berkurang, yang penting kan kewenangan negara yang paling besar di 1 tangan dan cepat untuk realisasinya. Itu semangatnya. Tapi kami tetap terus memberikan masukan. Kami sering diajak rapat sama Menko Perekonomian. Terima kasih Pak Darori.

Kemudian Pak Suhardi Duka. Kemarin sudah mendampingi. Karena tidak ada saya pikir nanti saya jawab tertulis.

Bu Alien Mus, masalah bagaimana perikanan tangkap ini bisa ditaruh di Pelabuhan dan bisa disimpan. Kami juga sudah catat di Provinsi Ibu menjadi prioritas karena banyak ikan. Kalau pun ditangkap tidak ada nilainya juga, tidak ada gunanya ini. Dunia Bu butuh ikan. Jadi kalau Ibu menganggap ikan itu murah sebenarnya ditempat Ibu saja yang murah, di dunia mahal. Hanya saja bagaimana disitu bisa kita bawa keluar atau kita pasarkan. Ini tugas kami. Mohon nanti kami dikasih masukan, titik-titik mana, disana sudah ada SKPT. SKPT Morotai, saya pikir cukup aktif dan ini akan diperkuat nanti dimana titik-titik itu. Kami ingin optimal semua program dalam kemampuan yang terbatas.

Kalau pengawasan laut saya pikir sama. Ini tetap menjadi prioritas.

Tadi yang tentang lobster sudah saya jawab. Bahwa siapa pun yang ada permasalahan silakan di cek dan kami siap.

Pak Slamet Wakil Ketua. Pergaraman, kita fokus. Kita melihat garam ini tidak hanya sebagai konsumsi tapi kita mengupayakan garam ini akan menjadi garam punya nilai lebih, kosmetik maupun keperluan-keperluan lainnya termasuk untuk garam spa. Dan sekarang langkah kami memang benar. Karena memang kebutuhan garam industrinya masih sangat tinggi terhadap kebutuhan untuk khusus industri dianggap garam kita belum memenuhi standar, upaya kami sekarang adalah bagaimana membuat garam-garam ini sesuai standar industri. Salah satu syarat standar industri itu NA-nya harus diatas 97. Ini kami sedang bekerjasama dengan BPPT untuk menemukan bagaimana membuat garam-garam nelayan kita ini bisa sesuai. Dan yang jelas kita juga sudah melakukan bantuan dengan bio membrane.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri,

Dia mau nanya NA itu apa?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

NACL Pak.

KETUA RAPAT:

NACL, artinya apa? Dia nanya saya.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Tahu Pak. Dia petambak garam juga NACL. Ini, dia yang tidak tahu yang 1 itu Pak yang barbershop.

Jadi Pak Slamet, intinya kami siap untuk akan menyetop impor tapi kan kalau kita keras-kerasan. Ada sementara posisi, ada yang butuh. Kalau sekarang harus nangani dengan keras-kerasan kan bukan waktunya Pak, komunikasi saja. Yang jelas komitmen dari Menteri Menko Perekonomian bahwa penyerapannya diwajibkan diatas 1,5 Juta sudah di tahun ini. Ini yang kita dorong terus. Sambil itu kita menguatkan garam-garam nelayan kita. Yang dulunya hanya produktivitasnya dibawah 80 ton sekarang karena dibantu bio membran sudah diatas 140-an, naik 40% Pak Slamet. Nah tolong Pak Slamet kalau ada hal-hal yang perlu dikuatkan kita juga memberi bantuan gudang-gudang untuk garam dan lain-lain.

Kemudian tadi di Sapeken apa perlu pasar ikan, tolong nanti dicek. Sampaikan juga Kepala Daerahnya. Kami juga sudah mendengar disana banyak ikan tapi harganya jatuh termasuk di Gurita. Paling besar disana banyak gurita. Jadi pasar ikan bertaraf internasional ini tidak ada meniadakan anggaran untuk pasar-pasar yang kecil. Kita juga akan cari jalan keluar untuk yang diperlukan masyarakat. Tapi pasar ikan yang bertaraf internasional ini maksudnya diharapkan kita bisa menjadi pusat ikan dunia berbasis miliknya Indonesia. Jangan ikan tapi yang ekspor bukan Indonesia, lewat negara lain atau negara tetangga.

Pak Effendi Sianpiar terima kasih atas masukannya.

Kemudian Pak Bambang Purwanto tentang tadi yang Bapak masukan. Saya pikir tinggal nanti teknis. Tadi masalah pabrik tepung, kita sudah cek. Itu dulu dari bantuan PDS dan kita akan meminta di Budidaya untuk ambil alih segera untuk bisa memproduksi pakan-pakan buat masyarakat nelayan.

Sebagai informasi Pak Sudin, pakan ikan memang tinggi presentasinya tapi sekarang sejak COVID ini dulu yang sempat naik 1000 kita minta mereka untuk turunkan kembali dan Alhamdulillah berkat bantuan Menteri Perindustrian semua akhirnya tidak jadi naikkan Pak Sudin sampai selesai ini. Kita harapkan sampai kapan, ini terus kita minta sampai COVID selesai. Tapi tetap kita pantau sejauhmana kemampuan mereka dalam berproduksi. Secara prinsip mereka sudah mau kerjasama Pak Sudin.

Kemudian masalah bantuan-bantuan nelayan-nelayan untuk kapal-kapal kecil katinting dan sebagainya, tadi ada masukan Pak Dirjen Tangkap tolong ini diprioritaskan untuk jadi bantuan.

Kemudian Ibu Endang Thohari tentang bagaimana pengolahan ikan. Saya minta Pak Nilanto dengan ikan dicampur dengan cassava saya pikir Ibu Endang ini memang ahli cassava. Nah nanti silakan saja. Pak Nilanto tolong nanti ditindaklanjuti produksi-produksi ikan apa. Kita sudah melakukan kerjasama melalui online Pak Sudin, memasarkan produk kita. Pak Sudin untuk yang masukke online jenis-jenis produk perikanan kita sudah lebih dari 60 Pak. Ini bisa dicek, dibuka lapak dan sebagainya. Ini terus diarahkan oleh Pak Menko Umar dan ini terus terjadi penambahan-penambahan. Mudah-mudahan Bapak/Ibu Anggota DPR nanti kalau mau beli ikan tidak perlu ke pasar bisa langsung lewat online.

Pak Sutrisno, yang masalah daratan. Kami juga sangat setuju, bagaimana kami bisa menjangkau ikan sampai ke atas gunung makanya kita perlu peran-peran para pelaku usaha. Kita juga menggandeng BUMN Pak Sudin atas arahan Pak Presiden. BUMN menugaskan Dirut Perindo dan Dirut Perinus. Dan Alhamdulillah ini sudah terjadi penyerapan-penyerapan, baik itu ikan laut maupun ikan darat, dan ini perlu terus masukan-masukan. Kalau tadi Ibu Luluk atau Bapak-Bapak yang ada melihat ikan di Budidaya tidak terserap segera disampaikan saja. Perinus dan Perindo siap menyerap. Kami juga memberikan penguatan juga Rp30 Miliar masing-masing Perinus-Perindo untuk dibantukan ke pihak ke-3 untuk membeli ikan. Jadi ditambah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat yang tadinya mau dikasih PMN mungkin diganti modal kerja Bu Dirut sama Pak Dirut, nanti tolong dimatangkan apa yang akan dilakukan. Modal kerjanya nanti dari Bank Himbara. Itu komitmen kemarin di Rapat Kabinet. Tolong saja itu dengan Dirjen PDS segera dimatangkan.

Kemudian masalah di Jati Gede. Pak Sutrisno kami siap untuk melakukan pembinaan. Mohon saja nanti Bapak didata siapa-siapa yang akan kita mulai. Undang kami pada waktunya. Baik yang di Patimbang, kita sudah siap suratnya ada, nanti kami jawab lebih detail secara resmi. Kemudian bantuan yang bertaraf internasional saya pikir, karena anggaran kemarin sempat di potong kita minta untuk ini segera kalau bisa dibantu. Kemudian yang kapal 5 GT, nanti diharapkan Tahun 2021 karena 2020 anggarannya tidak ada. Nanti yang lain-lain segera kami lengkapi Pak. Sampaikan salam ke Pak Bupati Subang. Masalah Jati Gede ini tinggal penguatan.

Ibu Maria Lestari, kita akan sinergi. Di Kijing kita akan, terima kasih masukannya. Kita akan segera perbaiki. Kemudian masalah BBM di perbatasan laut. Nah alat-alat bantuan nanti tinggal tolong diberi masukan apa yang ingin dibantu.

Pak Bagus Adhi terima kasih. Masalah riset dan pengembangan sumber daya manusia juga kami menjadi titik ukur. Karena tidak ada gunanya suatu pembangunan kalau hanya sekedar nafsu tapi tidak ada ukurannya. Anggaran juga tidak terarah.

Pak Rudi salam buat teman-teman disana. Apa yang bisa kita lakukan kita segera akan lakukan.

Pak Slamet masalah sertifikasi. Sertifikat kemarin di Pelabuhan Ratu itu adalah bantuan fasilitasi melakukan sertifikat yang punya nelayan-nelayan yang tidak ada sertifikatnya. Itu tahun ini ada 15.000 sertifikat dan mudah-mudahan nanti Bapak/Ibu Anggota Komisi IV yang perlu untuk merealisasikan ke Dapilnya kami siap untuk lakukan.

Saya ikut saja masalah capaian dengan KPI karena nanti akan kita lengkapi. Termasuk nanti tolong disiapkan Dirjen Budidaya, dan Dirjen Tangkap sama Badan Riset permintaan Ketua Komisi IV tentang hasil riset yang lobster tadi biar 1 pintu nanti diserahkan ke Pak Ketua, biar Pak Ketua serahkan ke Pak Ansy.

Masalah ini Pak Slamet tentang turun drastis produktivitas nelayan. Itu memang di BPS itu nol tapi itu bukan satuannya KKP, karena dia masuk di iklim nomenklaturnya pertanian. Artinya pertanian itu masuk pertanian itu sendiri, perikanan dan kehutanan. Nah di kelautan sendiri memang turun tapi kita diangka dari hampir 6, kita turun menjadi 3,9. Artinya kita masih positif diatas rata-rata nasional, Itu yang waktu itu. Kalau yang sekarang kami belum dapat laporannya tapi kalau turun drastis hingga negative itu saya belum tahu. Saya mohon kajian yang Bapak dapat mana surveynya tadi saya ingin mungkin menjadi catatan kami.

Demikin Bapak/Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami siap untuk terus bersinergi dan bekerja atas dasar arahan dan tuntunan dari Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi IV.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah menyampaikan jawabannya.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Dari dialog, diskusi, saran dan masukan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebelum acara ini kita akhiri akan kami bacakan rancangan kesimpulan Rapat Kerja pada hari ini.

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas pagu indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKAKL, KL, LKPKL Tahun 2021 sebesar Rp5.577.815.698.000,00 (Lima Triliun Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bapenas Nomor S-376/MK.02/2020, dan Nomor B.310/M/PPN/D.8/PP/04.02/05/2020, tanggal 8 Mei tentang pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021 dengan komposisi program per Eselon I sebagai berikut:

- a. Sekretaris Jenderal sebesar Rp494.722.807.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Rupiah);
- b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp87.767.955.000,00 (Delapan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
- c. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Rp607.253.792.000,00 (Enam Ratus Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);
- d. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebesar Rp893.040.404.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Empat Puluh Juta Empat Ratus Empat Ribu Rupiah);
- e. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp819.802.922.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);
- f. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp271.704.028.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- g. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp352.590.508.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah);
- h. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.579.173.626.000,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);
- i. Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp571.759.656.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Selanjutnya Komisi IV akan menelaah RKA dan RKP Tahun 2021. Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Anggota?

Pemerintah?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI mendukung usulan tambahan pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 sebesar

Rp3.453.100.000.000,00 (Tiga Triliun Empat Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Seratus Juta Rupiah), untuk kegiatan:

- a. Prioritas Nasional (PN), 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan sebesar Rp2.621.750.000.000,00 (Dua Triliun Enam Ratus Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- b. Prioritas Nasional (PN), 3. meningkatkan sumber daya manusia, berkualitas dan berdaya saing sebesar Rp424.800.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).
- c. Prioritas Nasional (PN), 6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim sebesar Rp30.900.000.000,00 (Tiga Puluh Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- d. Prioritas Nasional (PN), 7. memperkuat stabilitas politik hukum dan keamanan transformasi pelayanan publik sebesar Rp275.650.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- e. Dukungan manajemen sebesar Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah).

Saya minta nanti dukungan manajemen ini dievaluasi kembali, karena saya lihat angkanya terlalu besar, Ini kan baru pagu. Ya Pak Menteri ya.

Anggota?

Pemerintah?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV DPR RI mendukung peningkatan pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 menjadi sebesar ±Rp7.000.000.000.000,00 (Tujuh Triliun Rupiah) agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan padat karya dan bantuan sosial, seperti kegiatan gemar makan ikan, bakti mutu karantina, bakti nelayan, cluster budidaya udang, bantuan benih ikan dan pakan, ikan mandiri, kelompok penggerak konservasi, pugar, kelompok masyarakat pengawas, serta pelatihan dan pendidikan vokasi masyarakat dalam rangka memulihkan ekonomi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan pasca pandemi COVID-19 khususnya bagi nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, serta pengelola dan pemasaran hasil ikan.

Anggota?

Pemerintah?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV DPR RI Indonesia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya ikan yang terdapat diperairan Indonesia Bagian Timur agar bernilai tambah dan berdaya saing tinggi guna percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan devisa negara.

Anggota?

Pemerintah?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di perairan Indonesia, seperti pengawasan terhadap penyelundupan benih lobster atau sejenisnya yang masih berlangsung dalam rangka Peningkatan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) dan mencegah kerugian negara serta demi kelanjutan sumber daya perikanan Indonesia yang lestari.

Anggota?

Pemerintah?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Terima kasih Pak Ketua.

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaporkan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya kelautan dan melaporkan program dan kegiatan terkait dengan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dalam Rapat Kerja yang akan datang.

Anggota?

Pemerintah?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Kami coba Pak, 10 tahun terakhir nanti kita lihat karena memang hakikatnya PNBP kita itu baru mulai. Tidak apa-apa Pak kami laporkan.

KETUA RAPAT:

Harusnya kan ada data kan?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Iya ada Pak.

KETUA RAPAT:

Setuju?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih atas tanggapannya.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Sebelum kami menutup Rapat Kerja ini, kami persilakan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan kata penutup dalam Rapat Kerja hari ini. Saya minta padat, singkat, jelas.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Terima kasih Pak Ketua.

Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota Komisi IV,

Tak henti-henti kami akan menyampaikan ucapan terima kasih atas saran dan dukungan yang selama ini tidak berhenti. Tapi kami minta kalau

bisa jangan hanya dukungan, kritik, dan kami tidak masalah karena bagi kami itu penguat. Kami siap dimarahi, dibully tapi kami mohon solusi.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja pada hari ini.

Atas nama Pimpinan, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan atau kekhilafan. Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* *alamin* Rapat Kerja ini kami tutup.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.30 WIB)

a.n. Ketua Rapat
Sekretariat Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
NIP. 196301221991031001